

**THE EDUCATION SECTOR ANALYTICAL AND CAPACITY DEVELOPMENT PARTNERSHIP
(ACDP - 006)**

**PENGEMBANGAN STRATEGI
PENDIDIKAN DASAR BEBAS PUNGUTAN**

**SURVEI KONTRIBUSI ORANGTUA DALAM
PENDIDIKAN DASAR**

Mei 2013

KEMITRAAN UNTUK PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN ANALISIS PENDIDIKAN (ACDP):

Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan BAPPENAS), *Australian Agency for International Development (AusAID)*, Uni Eropa (EU) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah membentuk Kemitraan Untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP) sebagai fasilitas untuk memajukan dialog kebijakan dan reformasi kelembagaan dan organisasi sektor pendidikan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dan membantu mengurangi kesenjangan dalam kinerja pendidikan di provinsi dan kabupaten di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari Program Pendukung Sektor Pendidikan (ESSP) yang terdiri dari (i) dukungan sektor anggaran Uni Eropa dengan pengaturan yang telah disetujui untuk pencairan hibah - didasarkan oleh hasil dan (ii) kebijakan dan program yang dialokasikan oleh AusAID sektor pendukung hibah pengembangan yang terdiri dari: program prasarana sekolah, dan sebuah program pengembangan pengelolaan sekolah di kabupaten secara nasional serta sebuah program untuk mempercepat akreditasi sekolah-sekolah islam swasta di Indonesia. Laporan ini disiapkan dengan dukungan hibah dari AusAID dan Uni Eropa melalui ACDP.

PERUSAHAAN KONSULTAN:

Dua perusahaan konsultan utama yang bertanggungjawab terhadap penyiapan Survei Kontribusi Orangtua dalam Pendidikan Dasar (ver. 2013-05-13) ini adalah : **PT. Trans Intra Asia (TIA)**, Indonesia dan **Institute of Public Administration of Canada (IPAC)**. Konsultan utama ini juga berasosiasi dengan lima (5) lembaga, yaitu: dua (2) dari Canada (**Queens University** dan **Dalhousie University**) dan tiga (3) dari Indonesia (**Institut Pertanian Bogor**, **Fakultas Hukum Universitas Padjajaran**, dan **Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan**).

TIM KONSULTAN YANG MENYIAPKAN LAPORAN:

1. **Chris Majewski**, Team Leader/Basic Education Policy and Governance Expert
2. **Achmadi Ringoringo**, Education Finance Expert
3. **Robertus Soeharno**, PFM & Decentralization Expert
4. **Umaedi**, Capacity Development Expert
5. **I Made Sumertajaya**, Data Analyst
6. **Jeffry Fanciscus Haloho**, Research Assistant

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR ILUSTRASI	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
1. LATAR BELAKANG DAN KONTEKS	1
2. PENARIKAN CONTOH.....	1
2.1. Struktur Contoh.....	1
2.2. Komentar terhadap Contoh	3
3. TEMUAN UTAMA DARI SURVEI	4
3.1. Total kontribusi orangtua untuk pendidikan dasar	4
3.2. Kontribusi Orangtua pada Anggaran Sekolah/Madrasah	6
3.3. Rincian Kontribusi Orangtua yang dilaporkan oleh Sekolah/Madrasah.....	7
3.4. Perbedaan Kontribusi Orangtua antara Laporan orangtua dan sekolah/madrasah	8
3.5. Penggunaan Kontribusi Orangtua oleh Sekolah/Madrasah	9
3.6. Hubungan antara kontribusi orangtua dan biaya per siswa.....	9
3.7. Ketersediaan orangtua berkontribusi untuk pendidikan dasar	10
3.8. Dampak dana BOS dan kebijakan pendidikan dasar gratis terhadap kontribusi orangtua untuk pendidikan dasar	12
3.9. Persepsi Kepala Sekolah tentang dampak penghapusan iuran terhadap kualitas pendidikan	17
3.10. Hubungan antara anggaran sekolah, pendanaan orangtua dan hasil pembelajaran siswa	19
4. KESIMPULAN	20
LAMPIRAN 1 IMPLEMENTASI KEGIATAN SURVEI	22
LAMPIRAN (DALAM CD)	
1) DATA	
a) Data Survei Orangtua	
b) Data Survei Sekolah	
c) Data Susenas Modul Pendidikan	
d) Label Field untuk Data Susenas	
e) Label Variabel untuk Data Survei Sekolah	
f) Label Variabel untuk Data Survei Orangtua	
2) LAPORAN	
a) Draft Survei Orangtua (Bahasa Indonesia)	
b) Laporan Akhir Survei	
c) Final Survei Orangtua (Bahasa Inggris)	
3) PERLENGKAPAN SURVEI	
a) Berita Acara Kegiatan Survei	
b) Daftar Sekolah Sampel	
c) Distribusi Sampling	
d) Kuesioner Orangtua SD/MI	
e) Kuesioner Orangtua SMP/MTs	
f) Kuesioner Sekolah SD/MI	
g) Kuesioner Sekolah SMP/MTs	

- h) Panduan Teknis Lapangan
- i) Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
- j) Pedoman Pengisian Kuesioner Orangtua

Dokumen ini merupakan Volume 5 dari Pengembangan Strategi Pendidikan Dasar Bebas Pungutan. Laporan selengkapnya terdiri dari sembilan volume:

- Volume 1. Laporan Akhir
- Volume 2. Kerangka Konseptual Pendidikan Dasar Bebas Pungutan
- Volume 3. Analisis Bantuan Operasional Sekolah
- Volume 4. Proyeksi Biaya yang dibutuhkan untuk Pelaksanaan Pendidikan Dasar Bebas Pungutan hingga Tahun 2020
- Volume 5. Survei Kontribusi Orangtua dalam Pendidikan Dasar
- Volume 6. Strategi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Institusi Dalam Mendukung Implementasi Pendidikan Dasar Bebas Pungutan
- Volume 7. Bantuan bagi Keluarga Miskin dalam mendanai Biaya Pribadi untuk Pendidikan Dasar
- Volume 8. Kerangka Akuntabilitas
- Volume 9. Draf Peta Jalan Untuk Implementasi Strategi Pendidikan Dasar Bebas Pungutan

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi contoh menurut wilayah dan jenis sekolah/madrasah.....	1
Tabel 2. Distribusi contoh sekolah menurut Status	2
Tabel 3. Distribusi sekolah menurut standard akreditasi	2
Tabel 4. Distribusi contoh orangtua	3
Tabel 5. Total biaya per siswa yang dibelanjakan orangtua untuk pendidikan dasar 2010-2011 (madrasahs)	4
Tabel 6. Total biaya per siswa yang dibelanjakan orangtua untuk pendidikan dasar 2010-2011 (Sekolah)	5
Tabel 7. Proporsi pengeluaran orangtua untuk iuran sekolah/madrasah	6
Tabel 8. Rata-rata total anggaran menurut sumber pendanaan dan jenis/status sekolah/madrasah	6
Tabel 9. Persentase Kontribusi Orangtua terhadap anggaran sekolah/madrasah	7
Tabel 10. Rincian kontribusi orangtua yang dilaporkan oleh sekolah/madrasah	7
Tabel 11. Total pembayaran untuk sekolah/madrasah tahun ajaran yang dilaporkan orangtua dan sekolah/madrasah.	8
Tabel 12. Hubungan antara kontribusi orangtua dengan biaya per siswa	10
Tabel 13. Kesiadaan orang tua untuk memberikan kontribusi untuk biaya pendidikan anak-anak mereka, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan.....	10
Tabel 14. Besaran kontribusi orangtua untuk pendidikan dasar yang bersedia dibayar.....	11
Tabel 15. Rata-rata total biaya pendidikan dari orangtua untuk per siswa per tahun 2003 - 2009 (Rp nilai asli dan konstan tahun 2011)	12
Tabel 16. Persentase orangtua yang tidak membayar iuran sekolah/madrasah 2003 – 2011 (Data Susenas: 2003-2009, Data Survey ACDP: 2011)	13
Tabel 17. Rata-rata total biaya orangtua untuk pendidikan dasar menurut status desa periode 2003 - 2009 (Rp nilai konstan 2011).....	14
Tabel 18. Persepsi Kepala Sekolah tentang dampak penghapusan kontribusi orangtua terhadap kualitas pendidikan.....	17
Tabel 19. Persentase kepala sekolah yang mengidentifikasi dampak negatif dari kualitas pendidikan akibat penghapusan kontribusi orang tua, menurut jenis dampak negatif (kepala sekolah dapat memilih lebih dari satu jenis dampak)	18
Tabel 20. Hubungan antara total biaya per siswa dengan hasil pembelajaran.....	19
Tabel 21. Daftar sampel provinsi dan kabupaten/kota	24
Tabel 22. Perhitungan jumlah sampel sekolah dan orang tua siswa pada setiap provinsi dan kabupaten terpilih	25
Tabel 23. Susunan acara kegiatan training Supervisor	26
Tabel 24. Daftar wilayah survey untuk masing-masing supervisor	27
Tabel 25. Jadwal pelaksanaan survey lapangan.....	28
Tabel 26. Jenis data yang dikumpulkan pada masing-masing responden	29
Tabel 27. Rincian tugas masing-masing Supervisor wilayah.....	30
Tabel 28. Rincian tugas masing-masing Surveyor lapangan.....	30
Tabel 29. Daftar wilayah survey yang di supervisi.....	31
Tabel 30. Rincian tugas masing-masing pengentri data kuesioner	33

DAFTAR ILUSTRASI

DAFTAR ILUSTRASI

Ilustrasi 1.	Total biaya yang dibelanjakan orangtua untuk pendidikan dasar	5
Ilustrasi 2.	Rata-rata total biaya orangtua untuk pendidikan dasar menurut wilayah	14
Ilustrasi 3.	Jenis komponen biaya orangtua siswa SD, Susenas 2003 - 2009.....	15
Ilustrasi 4.	Jenis komponen biaya orangtua siswa MI, Susenas 2003 - 2009.....	16
Ilustrasi 5.	Jenis komponen biaya orangtua siswa SMP, Susenas 2003 - 2009.....	16
Ilustrasi 6.	Jenis komponen biaya orangtua siswa MTs, Susenas 2003 - 2009.....	17
Ilustrasi 7.	Sampling pemilihan provinsi dan kabupaten/kota	23
Ilustrasi 8.	Sampling of schools and parents' selection	25

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR SINGKATAN

ACDP	Analytical and Capacity Development Partnership
ADB	Asian Development Bank
AusAID	Australian Agency for International Development
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BOS	Biaya Operasional Sekolah
BSM	Bantuan Siswa Miskin
EMIS	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Education Management Information System)
FBE	Pendidikan Dasar Bebas Pungutan (Free Basic Education)
FGD	Kelompok Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion)
KKTPUU	Kelompok Kerja Teknik Pimpinan Unit Utama
Kemdikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
PDBP	Pendidikan Dasar Bebas Pungutan
SD	Sekolah Dasar
SIMP	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SPN	Standar Pendidikan Nasional
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Pemberantasan Kemiskinan
ToR	Kerangka Acuan Kerja (Terms of Reference)

TEKS UTAMA

1. LATAR BELAKANG DAN KONTEKS

Survei Kontribusi Orang Tua untuk Pendidikan Dasar diperlukan sebagai bagian laporan ACDP 6, Strategi Pengembangan Pendidikan Dasar Bebas Pungutan. Rancangan metodologi dan instrumen telah disetujui sebagai bagian dari Laporan Pendahuluan proyek. Dokumen yang menguraikan tentang metodologi survei dan instrumen disediakan sebagai Lampiran 1 - 8. Ukuran sampel dari kegiatan survei ini, seperti yang diusulkan dalam Laporan Pendahuluan, adalah sebanyak 4.032 orang tua dari 336 sekolah/madrasah di 14 kabupaten/kota. Karena keterbatasan anggaran mengakibatkan sampel harus dikurangi menjadi 2.781 orang di 228 sekolah/madrasah di 10 kabupaten/kota.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara penyelenggaraan pendidikan dengan besarnya biaya ditanggung oleh orang tua siswa di pendidikan dasar. Selain itu, data yang dikumpulkan dari sekolah/madrasah dalam sampel memuat informasi tentang anggaran total dan kontribusi total yang diterima dari orang tua selama tahun ajaran 2010/2011, serta informasi tentang bagaimana dana tersebut digunakan.

Dengan memanfaatkan data dari Modul Pendidikan dan Survei Sosial Ekonomi dan Sosial Nasional (Susenas), studi ini juga mampu menganalisis tren dari kontribusi orang tua dari waktu ke waktu, dan efek dari pemberian Dana Operasional Sekolah (BOS) terhadap pengeluaran orang tua untuk pendidikan anak-anak mereka. Modul Pendidikan dan Sosial dikumpulkan setiap tiga tahun sekali, dan yang terbaru dilakukan pada tahun 2009. Data Susenas untuk tahun 2003, 2006 dan 2009 dianalisis untuk menentukan tren secara keseluruhan sumbangan orangtua siswa dari waktu ke waktu termasuk analisis perubahan komponen biaya seperti biaya, seragam, makanan ringan dan transportasi.

2. PENARIKAN SAMPEL

2.1. Struktur sampel

Metodologi yang digunakan untuk merancang sampel adalah penarikan contoh berstrata bertingkat. Provinsi survei dipilih secara acak dengan mempertimbangkan cakupan geografis yang luas, dan tingkat kemajuan yang ditentukan berdasarkan berbagai faktor termasuk produk domestik bruto dan tingkat partisipasi pendidikan. Pemilihan kabupaten/kota dilakukan dengan cara yang sama yaitu mempertimbangkan keterwakilan tingkat kemajuan daerah.

Pemilihan sekolah dilakukan untuk menjamin keterwakilan dari setiap jenis pendidikan dasar: sekolah dan madrasah, SD dan SMP, pemerintah dan swasta. Lihat Tabel 1 dan 2, di bawah ini.

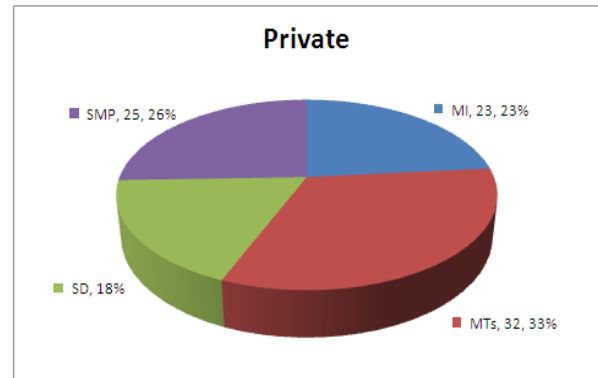
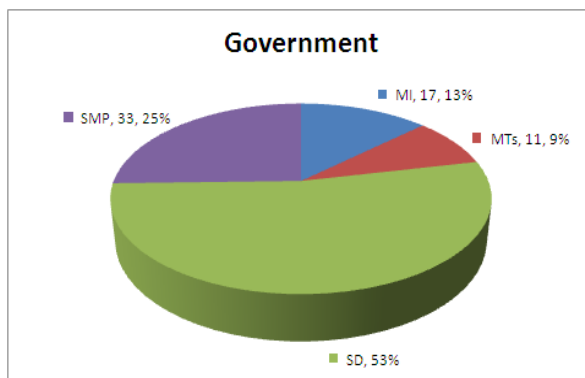
Tabel 1. Distribusi contoh menurut wilayah dan jenis sekolah/madrasah

Provinsi	Kabupaten/Kota	Sekolah/Madrasah				Total
		MI	MTs	SD	SMP	
Bali	Buleleng	2	5	10	7	24
Bengkulu	Bengkulu Utara	4	3	8	9	24
Jawa Timur	Kota Surabaya	6	1	3	3	13
	Lamongan	5	8	5	5	23
Kalimantan Selatan	Banjar	6	6	6	6	24
Maluku	Kota Tual	3	1	13	7	24

Provinsi	Kabupaten/Kota	Sekolah/Madrasah				Total
		MI	MTs	SD	SMP	
Sulawesi Selatan	Bantaeng	4	6	8	6	24
	Bone	6	6	6	6	24
Sumatera Barat	Kep. Mentawai	-	1	20	3	24
	Kota Padang	4	6	8	6	24
Total		40	43	87	58	228

Tabel 2. Distribusi contoh sekolah menurut Status

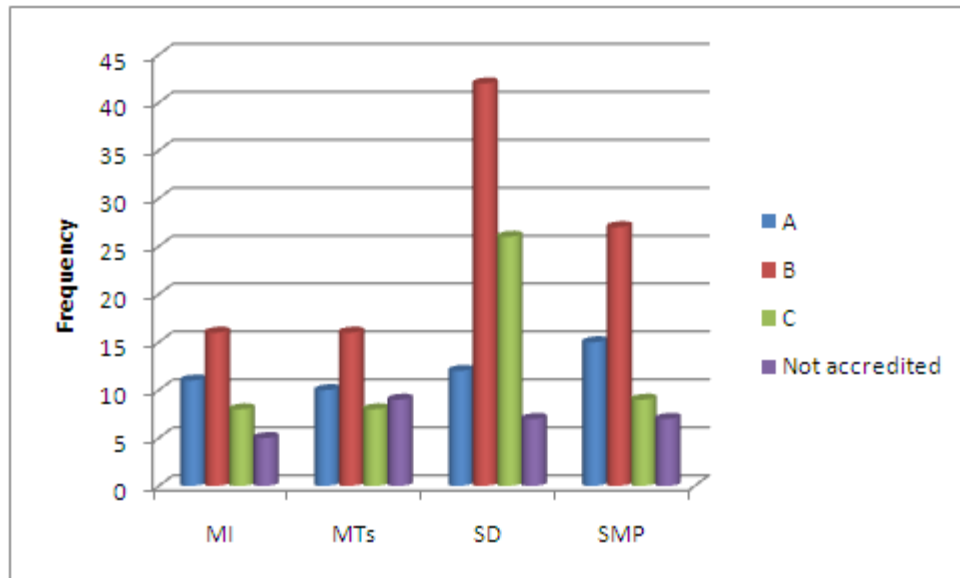
	Sekolah/Madrasah				Total
	MI	MTs	SD	SMP	
Negeri	17	11	69	33	130
Swasta	23	32	18	25	98
Total	40	43	87	58	228



Sekolah/madrasah juga dipilih dengan mempertimbangkan keterwakilan tingkat akreditasi, sebagai indikator mutu tidak langsung.

Tabel 3. Distribusi sekolah menurut standard akreditasi

Akreditasi	Sekolah/madrasah				Total
	MI	MTs	SD	SMP	
A	11	10	12	15	48
B	16	16	42	27	101
C	8	8	26	9	51
Tidak terakreditasi	5	9	7	7	28
Total	40	43	87	58	228



Target survey 12 orangtua siswa untuk setiap sekolah/madrasah, seperti disajikan pada Tabel 4, di bawah ini.

Tabel 4. Distribusi contoh orangtua

Provinsi	Kab/Kota	Jenis Sekolah/Madrasah				Total
		MI	MTs	SD	SMP	
Bali	Buleleng	24	60	120	84	288
Bengkulu	Bengkulu Utara	48	36	96	108	288
Jawa Timur	Kota Surabaya	66	24	48	84	222
	Lamongan	49	96	59	60	264
Kalimantan Selatan	Banjar	72	72	72	72	288
Maluku	Kota Tual	36	12	156	84	288
Sulawesi Selatan	Bantaeng	48	72	96	76	292
	Bone	72	72	72	72	288
Sumatera Barat	Kep. Mentawai	-	11	233	33	277
	Kota Padang	45	72	97	72	286
Total		460	527	1,049	745	2,781

2.2. Komentar terhadap sampel

Pemilihan contoh orangtua dirancang agar dapat mewakili kondisi status social ekonomi dan latar belakang pendidikan. Status ekonomi diukur berdasarkan tingkat pendapatan dan daya listrik terpasang, yang di Indonesia diduga memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat pendapatan. Rata-rata tingkat pendapatan keluarga dalam survey diperoleh sebesar Rp. 1,569,346 per bulan, dengan median sebesar Rp 1,000,000. Dari contoh orangtua, sepertiganya tidak lulus SMP/MTs. Sedangkan contoh orangtua yang pendidikannya di atas SMA/MA termasuk diploma dan sederajat

mencapai 17.1%, yang menunjukkan contoh orangtua cenderung menjulur ke kanan yang lebih baik dari kondisi pendidikan secara rata-rata.

Terbatasnya ukuran sampel berarti bahwa data yang dibangkitkan hanya menyajikan ilustrasi dan tidak merepresentasikan kondisi Indonesia secara umum. Disamping itu, juga tidak bisa diperbandingkan secara langsung dengan data yang dibangkitkan dari Susenas yang lebih mewakili Indonesia.

3. TEMUAN UTAMA DARI SURVEI

3.1. Total kontribusi orangtua untuk pendidikan dasar

Dari hasil survei diperoleh bahwa orangtua pada semua jenis sekolah/madrasah memberikan kontribusi biaya untuk penyelenggaraan pendidikan dasar anak-anaknya (Tabel 5 dan 6, dibawah). Biaya untuk siswa SMP secara umum lebih tinggi dari sekolah dasar, kecuali untuk siswa MTs swasta, yang cenderung berasal dari golongan masyarakat dengan strata social ekonomi rendah.

Beberapa komponen biaya tertinggi yang dikeluarkan orangtua adalah uang saku, uang transportasi dan uang untuk seragam. Iuran sekolah merupakan komponen biaya utama di sekolah menengah / madrasah, dimana di SMP swasta adalah yang tertinggi diikuti oleh MTs Negeri. Uang saku mungkin tampak tinggi, tetapi itu adalah umum di Indonesia bagi orangtua untuk memberikan anak uang untuk membeli "jajan" di hari sekolah. Tidak ada jumlah hari yang diamanatkan untuk anak-anak Indonesia harus bersekolah, tetapi secara rata-rata jumlah hari efektif bersekolah dalam satu tahun sekitar 200 hari, maka nilai rata-rata uang saku yang diberikan kepada siswa di sekolah per hari berkisar dari Rp 2.200 di MI swasta sampai Rp 4.900 untuk MTs Negeri.

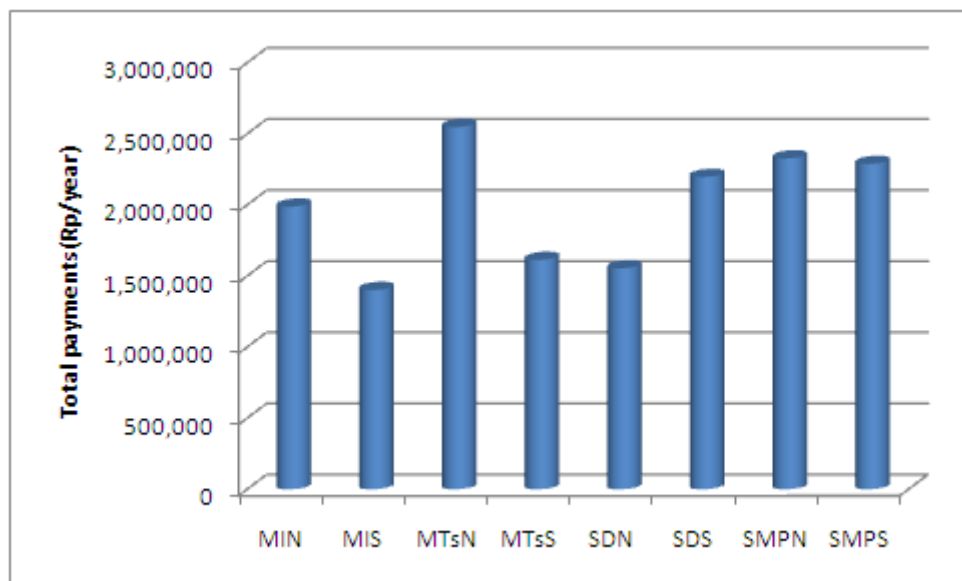
Tabel 5. Total biaya per siswa yang dibelanjakan orangtua untuk pendidikan dasar 2010-2011 (madrasahs)

Komponen biaya (Rp/tahun/siswa)	Madrasah			
	MIN	MIS	MTsN	MTsS
Buku teks	58,528	39,966	35,877	13,409
LKS	45,194	44,021	126,398	59,701
Buku dan alat tulis	172,948	122,590	164,399	126,227
Seragam	300,787	219,453	350,227	246,128
Transportasi	399,868	259,866	211,010	100,358
Kursus	118,807	68,479	62,592	57,151
Buku penunjang	46,041	28,935	39,347	34,717
Karyawisata	22,513	7,130	37,902	31,010
Uang saku	672,923	433,513	979,317	540,664
Lainnya	67,693	23,369	103,706	27,583
Iuran sekolah	82,509	154,159	437,358	376,120
Total	1,987,811	1,401,489	2,548,133	1,613,095

Tabel 6. Total biaya per siswa yang dibelanjakan orangtua untuk pendidikan dasar 2010-2011 (Sekolah)

Komponen biaya (Rp/tahun/siswa)	SEKOLAH			
	SDN	SDS	SMPN	SMPS
Buku teks	22,219	70,399	35,269	41,901
LKS	58,633	80,070	90,478	65,931
Buku dan alat tulis	180,502	211,682	186,477	160,997
Seragam	257,160	288,144	257,030	286,536
Transportasi	343,347	498,364	266,535	150,682
Kursus	85,304	163,972	124,069	88,631
Buku penunjang	30,052	73,246	72,577	60,588
Karyawisata	10,860	11,221	28,296	17,699
Uang saku	494,886	590,558	829,750	698,300
Lainnya	12,127	35,007	83,686	91,693
Iuran sekolah	54,043	173,857	352,565	628,410
Total	1,554,133	2,196,520	2,326,732	2,288,368

Ilustrasi 1. Total biaya yang dibelanjakan orangtua untuk pendidikan dasar



Proporsi pengeluaran orangtua untuk iuran sekolah, didefinisikan sebagai setiap kontribusi yang dibayarkan langsung ke sekolah atau komite sekolah, secara substansial bervariasi, hanya 3,5% untuk SD Negeri, tetapi 27,5% untuk SMP swasta dan 23,3% untuk MTs Swasta (Tabel 7). Dapat dicatat bahwa, untuk perbandingan, studi ACDP baru saja menyelesaikan tentang Pendanaan Madrasah yang dilakukan di lima provinsi menemukan bahwa besarnya rata-rata kontribusi orangtua dari anggaran MTs Swasta sebesar 31%.

Perlu dicatat bahwa survei ACDP awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April 2012. Untuk mendapatkan data lengkap untuk satu tahun ajaran penuh, kuesioner difokuskan pada tahun ajaran 2010-2011. Penundaan pelaksanaan survey berkaitan dengan finalisasi anggaran untuk survei, dan diskusi terkait tentang ukuran sampel, hal ini berarti bahwa sebagian besar pendataan

orangtua dilakukan selama periode ujian akhir tahun. Oleh karena itu, mungkin bahwa beberapa orang tua cenderung untuk melaporkan biaya untuk tahun ajaran 2011-2012 bukan 2010-2011.

Tabel 7. Proporsi pengeluaran orangtua untuk iuran sekolah/madrasah

Jenis Sekolah/Madrasah	Status	Persentase Pengeluaran iuran Sekolah/Madrasah (%)
MI	Negeri	4.1%
	Swasta	11.0%
MTs	Negeri	17.2%
	Swasta	23.3%
SD	Negeri	3.5%
	Swasta	7.9%
SMP	Negeri	15.2%
	Swasta	27.5%

3.2. Kontribusi orangtua pada anggaran sekolah/madrasah

Rata-rata total anggaran sekolah/madrasah dalam survei ini disajikan pada Tabel 8. Tabel tersebut bersumber dari laporan tahunan sekolah untuk tahun ajaran 2010-11, yang memuat sumber pendanaan termasuk pemerintah, orang tua dan Yayasan.

Tabel 8. Rata-rata total anggaran menurut sumber pendanaan dan jenis/status sekolah/madrasah

Jenis Sekolah/Madrasah	Status	Pemerintah Pusat (Rp/tahun)	Pemerintah Daerah (Rp/tahun)	Kontribusi Orangtua (Rp/tahun)	Kontribusi Yayasan (Rp/tahun)	Sumber Lain (Rp/tahun)	Total Penerimaan (Rp/tahun)
		Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean
MI	Negeri	1,169,079,029	11,547,294	3,766,406	-	320,588	1,184,713,318
	Swasta	68,851,007	6,949,636	17,148,568	136,364	45,455	93,131,030
MTs	Negeri	2,385,735,874	9,050,036	17,303,409	-	-	2,412,089,320
	Swasta	87,562,882	9,819,129	34,723,255	1,402,037	17,898,548	151,405,851
SD	Negeri	41,909,982	277,168,576	5,415,287	-	239,754	324,733,599
	Swasta	150,475,920	13,000,400	32,151,250	40,015,800	333,333	235,976,703
SMP	Negeri	224,687,518	1,272,595,106	115,698,939	977,576	-	1,613,959,139
	Swasta	101,182,632	13,709,100	55,249,720	57,166,440	1,962,600	229,270,492
Seluruhnya		293,451,978	279,870,597	34,812,948	9,453,458	2,833,691	620,422,671

Terdapat perbedaan yang substansial dalam proporsi anggaran sekolah/madrasah yang didanai dari sumbangan orang tua, seperti yang disajikan pada Tabel 9. Kontribusi orang tua merupakan bagian yang lebih besar dari anggaran sekolah dan madrasah swasta, dengan SMP swasta melaporkan proporsi terbesar dari anggaran mereka berasal dari sumbangan orang tua siswa yaitu 24,1%. Persentase terendah dalam kategori ini adalah madrasah negeri, yaitu sebesar 0,3%.

Tabel 9. Persentase kontribusi orangtua terhadap anggaran sekolah/madrasah

Jenis Sekolah/Madrasah	Status	Persentase Kontribusi Orangtua
MI	Negeri	0.3%
	Swasta	18.4%
MTs	Negeri	0.7%
	Swasta	22.9%
SD	Negeri	1.7%
	Swasta	13.6%
SMP	Negeri	7.2%
	Swasta	24.1%

Hal ini mengkhawatirkan dimana kontribusi orangtua sangat tinggi pada anggaran madrasah swasta. Kekhawatiran ini dapat diterima mengingat komunitas sekolah yang dilayani oleh madrasah cenderung berasal dari masyarakat termiskin. Sebuah penelitian yang baru diselesaikan oleh ACDP tentang pembiayaan madrasah di delapan kabupaten juga menunjukkan bahwa kontribusi orang tua lebih dari 25% dari anggaran madrasah swasta.

Kekhawatiran lain yaitu sekolah dan madrasah dengan status akreditasi rendah, atau tanpa akreditasi sampai saat ini, anggaran mereka cenderung memiliki persentase kontribusi orangtua tertinggi. Non-terakreditasi MTs swasta dan SMP memiliki tingkat kontribusi orang tua tertinggi, yaitu masing-masing 27% dan 28,2%.

3.3. Rincian kontribusi orangtua yang dilaporkan oleh sekolah/madrasah

Tabel 10. Rincian kontribusi orangtua yang dilaporkan oleh sekolah/madrasah

	Sekolah/Madrasah							
	MI		MTs		SD		SMP	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sumbangan awal tahun	-	-	3,704	20,648	3,486	13,490	49,154	43,496
Iuran rutin bulanan	-	-	16,160	81,803	9,868	41,308	147,833	178,695
Biaya pendaftaran	-	4,232	312	2,906	91	936	1,180	3,868
Biaya pendaftaran ulang	-	2,839	4,385	439	-	-	-	7,936
Iuran Praktikum	-	122	1,885	366	706	-	-	-
Ulangan umum	-	-	-	13,405	668	2,173	2,814	8,723
Ujian sekolah	-	4,625	-	3,213	252	4,227	2,347	-
Pelajaran tambahan	-	922	-	12,354	94	490	33,640	28,143
Pelajaran tambahan	-	412	-	353	-	-	307	520
Kegiatan ekstrakurikuler wajib	-	7,140	-	3,845	-	1,044	-	9,157
Kegiatan ekstrakurikuler pilihan	-	-	-	274	-	2,350	-	963
Karyawisata	2,491	4,350	1,134	6,844	188	435	573	6,998
Perpisahan	416	4,414	-	31,457	178	1,523	486	10,192
Sumbangan sosial	244	2,465	-	4,504	409	22	326	11,044
Iuran lainnya	-	1,868	-	6,816	-	-	-	-
Sumbangan lain	12,503	81,773	8,394	91,971	16,610	36,935	18,831	49,589
TOTAL	15,655	115,161	35,974	281,197	32,551	104,932	257,490	359,324

Data menunjukkan bahwa kontribusi orang tua siswa sekolah menengah cenderung lebih besar daripada kontribusi orang tua siswa sekolah dasar, kecuali MTs Negeri, yang rata-rata kontribusi orang tuanya rendah, yaitu hanya Rp 35.974 per tahun. Kontribusi orangtua untuk SD Swasta dan MI Swasta lebih besar daripada SD Negeri dan MI Negeri.

3.4. Perbedaan kontribusi orangtua antara laporan orangtua dan sekolah/madrasah

Orang tua melaporkan pembayaran sekolah/madrasah yang lebih tinggi daripada jumlah pembayaran orangtua yang diidentifikasi dari laporan tahunan sekolah. Perbedaan antara dua laporan disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Total pembayaran untuk sekolah/madrasah tahun ajaran yang dilaporkan orangtua dan sekolah/madrasah.

	MI	MI	MTs	MTs	SD	SD	SMP	SMP
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Data orangtua (Rp per tahun)	82,509	154,159	437,358	376,120	54,043	173,857	352,565	628,410
Data sekolah/madrasah (Rp per tahun)	15,655	115,161	35,174	281,197	32,551	104,932	257,490	359,324
Beda (Orangtua - Sekolah)	66,854	38,998	401,384	94,923	21,492	68,925	95,075	269,086

Hal ini mengejutkan bahwa untuk setiap jenis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar, orang tua melaporkan melakukan pembayaran secara signifikan lebih besar daripada yang tercatat dalam laporan keuangan sekolah/madrasah. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk fenomena ini:

1. Pembayaran yang dilaporkan orang tua untuk sekolah/madrasah berlebihan;
2. Contoh orangtua tidak merepresentasikan orangtua secara umum dari sekolah/madrasah yang dijadikan contoh;
3. Administrator dari sekolah/madrasah, khususnya kepala sekolah, kurang melaporkan penerimaan dari orang tua;
4. Beberapa pembayaran yang dilakukan orang tua untuk komite sekolah, bukan ke rekening sekolah, dan beberapa yang lain, seperti pembayaran untuk kegiatan praktikum dibayarkan langsung ke guru, dan tidak dilaporkan oleh sekolah, dan
5. Pembayaran untuk pelajaran tambahan yang ditawarkan oleh sekolah/madrasah mungkin tidak dilaporkan oleh sekolah/madrasah.

Hal ini bias diterima mengingat contoh orangtua untuk setiap sekolah madrasah tidak mewakili kondisi orangtua di Indonesia, karena 17,1% dari contoh orangtua memiliki kualifikasi di atas SMA sedangkan menurut hasil sensus 2010 hanya 5.2%. Hal ini juga mungkin mengindikasikan bahwa contoh orangtua yang disurvei bukan mewakili kondisi orang tua di sekolah. Data survei menunjukkan bahwa besarnya median pembayaran untuk sekolah dari kelompok orangtua ini sebesar Rp 240.000 per tahun, adalah 145% dari Rp 165.000 yang dibayarkan oleh orang tua diluar kelompok tersebut.

Penjelasan untuk perbedaan antara kontribusi yang dilaporkan oleh orang tua dan sekolah/madrasah juga mungkin ditemukan dalam kombinasi faktor 2 - 5, di atas. Ada bukti anekdotal untuk mendukung anggapan bahwa praktik-praktik dapat ditemukan dalam sistem pendidikan Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Desentralisasi Pendidikan Dasar (DBE) menunjukkan bahwa dengan penguatan kebijakan pendidikan gratis di tingkat nasional dan lokal, sekolah/madrasah, terutama di sektor negeri, sudah menghapuskan biaya formal tetapi telah mengganti beberapa biaya ini dalam bentuk pembayaran lain. Dari sebuah artikel tahun 2011 yang

diterbitkan oleh Lembaga Studi Pembangunan dari Universitas Sussex juga melaporkan bahwa praktek mengumpulkan dana dari orang tua dan tidak melaporkan dana tersebut, hal ini tidak biasa dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebuah studi 2010 yang dilakukan untuk Kemitraan Pendidikan Dasar Australia Indonesia menemukan bahwa sebagian besar sekolah terpencil dan miskin, sekitar sepertiga dari komite sekolah terlibat dalam penggalangan dana.

Dokumentasi dalam Ilustrasi 1 - 4 (bawah), data Susenas menunjukkan bahwa antara 2003 dan 2009, pembayaran untuk sekolah meningkat tajam. Pada tahun 2006, pembayaran ini meningkat menjadi rata-rata sekitar Rp 100.000 per siswa di SD dan MI, dan lebih dari Rp 160.000 per siswa SMP dan MTs. Tabel 10 (di atas) menunjukkan bahwa sekolah/madrasah melaporkan hanya sebagian kecil dari kontribusi orang tua yang dikumpulkan.

Selain mengumpulkan salinan dari anggaran sekolah/madrasah tahun 2010/11, survei ACDP juga memperoleh salinan laporan mereka tentang penggunaan dana BOS. Secara formal, laporan ini mengidentifikasi dan melaporkan semua sumber pendanaan, tetapi hanya kurang dari 10% melaporkan sumber pendanaan diluar BOS, hal ini memperkuat anggapan bahwa uang yang diperoleh dari orang tua untuk komite sekolah dan asosiasi orang tua sering tidak dilaporkan oleh sekolah/madrasah. Adalah penting untuk dapat menyelesaikan dan memperbaiki praktek ini.

Pemeriksaan yang lebih mendalam tentang perbedaan antara apa yang telah dibayarkan orangtua ke sekolah/madrasah dan apa yang dilaporkan pihak sekolah/madrasah menunjukkan bahwa ada dua item lainnya dari pengeluaran yang perbedaannya cukup menonjol. Orangtua dari semua sekolah/madrasah melaporkan biaya pendaftaran, baik untuk siswa baru dan berulang, yang lebih tinggi. Mereka yang sekolah di sekolah swasta dan madrasah negeri, baik SD dan SMP, melaporkan iuran bulanan yang lebih tinggi daripada laporan sekolah/madrasah.

3.5. Penggunaan Kontribusi Orangtua oleh Sekolah/Madrasah

Pemeriksaan penggunaan kontribusi orangtua oleh sekolah/madrasah mengungkapkan bahwa penggunaan dana tersebut kurang transparan. Rata-rata, 42% dari pengeluaran sumbangan orangtua siswa digunakan untuk kategori "lainnya". Dari 16 kategori pengeluaran hanya satu yang besar, yaitu 35% digunakan untuk gaji guru dan tunjangan guru lainnya. Pengeluaran tertinggi berikutnya berkaitan dengan fasilitas, yaitu 5% dari kontribusi. Ada kebutuhan yang penting untuk pelaporan yang lebih lengkap terkait penggunaan sumbangan orangtua siswa, dan untuk menunjukkan hubungan antara pengeluaran tersebut dengan prioritas pendidikan atau pengembangan sekolah/madrasah.

3.6. Hubungan antara kontribusi orangtua dan biaya per siswa

Rata-rata biaya per siswa di sekolah/madrasah yang disurvei menunjukkan variasi yang lebar, mulai dari yang tertinggi sebesar Rp 6.696.000 dalam MI Negeri ke yang terendah Rp 966.000 di MI Swasta. Hubungan antara per-siswa biaya dan proporsi kontribusi orangtua ditunjukkan dalam Tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12. Hubungan antara kontribusi orangtua dengan biaya per siswa

Jenis sekolah/madrasah	Status	Biaya per siswa (1000 Rp/tahun/siswa)	Persentase biaya per siswa terhadap kontribusi orangtua
		Mean	
MI	Negeri	6,696	0.3%
	Swasta	966	18.4%
MTs	Negeri	6,577	0.7%
	Swasta	1,420	22.9%
SD	Negeri	2,164	1.7%
	Swasta	1,198	13.6%
SMP	Negeri	3,638	7.2%
	Swasta	1,236	24.1%

Data dalam Tabel 12 menunjukkan bahwa ada hubungan terbalik antara biaya per-siswa dan kontribusi orangtua. Apabila biaya per siswa lebih tinggi, proporsi kontribusi pemerintah tinggi dan kontribusi orang tua rendah, dan apabila biaya per siswa rendah maka proporsi kontribusi pemerintah rendah dan kontribusi orang tua tinggi. Hal ini sangat terlihat jelas pada madrasah negeri, baik MI dan MTs, memiliki biaya per siswa sangat tinggi tetapi proporsi kontribusi orang tua sangat kecil.

3.7. Kesiediaan orangtua berkontribusi untuk pendidikan dasar

Responden orangtua dalam survei ditanya apakah mereka bersedia memberikan kontribusi untuk operasional sekolah anak-anak mereka/madrasah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Tabel 13, di bawah, merangkum tanggapan mereka.

Tabel 13. Kesiediaan orang tua untuk memberikan kontribusi untuk biaya pendidikan anak-anak mereka, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan.

Jenis Sekolah/Madrasah	Status	Kesediaan berkontribusi untuk meningkatkan mutu				Total	
		Yes		No			
		N	%	N	%	N	%
MI	Negeri	111	56.3	86	43.7	197	100
	Swasta	172	65.4	91	34.6	263	100
MTs	Negeri	84	58.7	59	41.3	143	100
	Swasta	254	66.1	130	33.9	384	100
SD	Negeri	486	58.1	350	41.9	836	100
	Swasta	153	71.8	60	28.2	213	100
SMP	Negeri	299	73.6	107	26.4	406	100
	Swasta	267	78.8	72	21.2	339	100

Seperti digambarkan di atas, kebanyakan orangtua dalam setiap jenis sekolah/madrasah menunjukkan kesiediaan untuk memberikan kontribusi. Terlihat bahwa orangtua siswa MI Negeri kesiediaannya paling rendah (56,3%) dan SMP swasta kesiediaannya paling tinggi (78,8%), selanjutnya diikuti oleh kesiediaan orang tua siswa di SMP Negeri (73,6%). Perlu dicatat bahwa

beberapa orang tua yang tidak bersedia untuk memberikan kontribusi karena mereka tidak percaya bahwa dana yang disediakan oleh mereka akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Kesediaan orang tua untuk memberikan kontribusi tertinggi di antara sekolah/madrasah adalah sekolah/madrasah dengan tingkat akreditasi nasional tertinggi (A), dan kontribusi terendah adalah sekolah/madrasah dengan tingkat akreditasi nasional terendah (C). Hal ini mungkin menunjukkan bahwa kualitas sekolah/madrasah yang mereka rasakan memiliki dampak terhadap kesediaan orangtua berkontribusi.

Orang tua dari semua sekolah/madrasah menunjukkan bahwa komponen anggaran tertinggi yang dapat dibiayai dari kontribusi mereka adalah upah dan insentif guru. Khusus untuk SMP, komponen anggaran yang dinilai tertinggi adalah untuk pengembangan laboratorium. Hal yang sama juga terjadi untuk kontribusi orangtua di MTs, baik swasta maupun negeri. Karya wisata dan pengadaan buku untuk perpustakaan umumnya dinilai terendah.

Orang tua dari semua sekolah/madrasah menunjukkan bahwa komponen anggaran tertinggi yang dapat dibiayai dari kontribusi mereka adalah upah dan insentif guru. Khusus untuk SMP, komponen anggaran yang dinilai tertinggi adalah untuk pengembangan laboratorium. Hal yang sama juga terjadi untuk kontribusi orangtua di MTs, baik swasta maupun negeri. Karya wisata dan pengadaan buku untuk perpustakaan umumnya dinilai terendah.

Tabel 14. Besaran kontribusi orangtua untuk pendidikan dasar yang bersedia dibayar

Jenis Sekolah/Madrasah	Status	Besaran Kontribusi (Rp/bulan)		
		Minimum	Rata-rata	Maksimum
MI	Negeri	1,000	25,768	500,000
	Swasta	1,000	19,571	150,000
MTs	Negeri	5,000	57,255	700,000
	Swasta	1,000	29,553	200,000
SD	Negeri	1,000	17,729	250,000
	Swasta	1,000	21,833	200,000
SMP	Negeri	1,000	42,113	500,000
	Swasta	1,000	53,554	500,000

Ada perbedaan yang mencolok dalam besaran kontribusi orangtua yang bersedia dibayarkan untuk kegiatan operasional SMP/MTs negeri dengan swasta, menunjukkan kesadaran orang tua bahwa biaya pendidikan per siswa dapat diharapkan lebih tinggi di sektor menengah pertama.

Orang tua siswa di MTs Negeri yang paling bersedia memberikan kontribusi besar, dan orang tua di MI Negeri menawarkan rata-rata kontribusi terbesar pada tingkat pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan, madrasah tampaknya lembaga yang paling murah hati yang didanai pemerintah dalam pendidikan dasar. Kontribusi orang tua dari MTs Swasta terendah di antara semua kontribusi orang tua siswa di tingkat menengah pertama. Ini mungkin menunjukkan kelompok tersebut berasal dari golongan social ekonomi rendah.

Orang tua dari siswa SD dan SMP yang bersedia memberi kontribusi terbesar adalah sekolah dengan tingkat akreditasi tertinggi (A), dan kontribusi terkecil adalah sekolah dengan akreditasi

paling rendah (C atau tidak terakreditasi), tetapi di MI dan di MTs, tingkat tertinggi dari kontribusi yang ditawarkan adalah madrasah dengan tingkat akreditasi menengah (B).

Diakui bahwa data yang berhubungan dengan kesediaan orang tua memberikan kontribusi dapat dipertanyakan. Ada kemungkinan bahwa orang tua yang bersedia untuk memberikan kontribusi pada kenyataannya mereka tidak akan bersedia berkontribusi. Data telah diperiksa dengan mengidentifikasi hubungan antara kapasitas orang tua untuk membayar, seperti ditunjukkan oleh tingkat pendapatan yang mereka laporkan dan tingkat daya listrik terpasang, serta besaran kontribusi yang bersedia mereka bayarkan. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara meningkatnya kemampuan ekonomi dengan meningkatnya besaran kontribusi yang ditawarkan. Makin kaya orang tua maka semakin besar rata-rata kontribusi yang bersedia mereka bayarkan. Orang tua dengan tingkat pendapatan keluarga terendah dan yang memiliki pasokan listrik kecil, rata-rata kontribusi yang bersedia dibayarkan Rp 18.573. Sementara orangtua dari tingkat pendapatan tinggi dengan pasokan listrik besar, rata-rata kontribusi yang bersedia dibayarkan Rp 133.336. Hanya sebagian kecil orang tua yang menunjukkan kesediaan untuk memberikan kontribusi yang tampaknya tidak proporsional dengan kemampuan mereka.

3.8. Dampak dana BOS dan kebijakan pendidikan dasar gratis terhadap kontribusi orangtua untuk pendidikan dasar

Analisis ini menggunakan data Susenas tahun 2003, 2006, dan 2009. Susenas yang dikumpulkan ini adalah data hasil wawancara dengan orang tua, di mana mereka diminta untuk memperkirakan biaya yang dikeluarkan dari saku mereka untuk pendidikan anak mereka di sekolah/madrasah. Biaya mencakup kontribusi biaya yang diberikan langsung ke sekolah/madrasah dan biaya pribadi seperti transportasi dan seragam. Untuk tahun 2003, data Susenas tidak terpisah antara sekolah/madrasah negeri dengan swasta.

Dari Tabel 15 menunjukkan bahwa biaya orang tua telah meningkat selama enam tahun antara 2003 dan 2009 di setiap kategori sekolah/madrasah. Biaya orang tua siswa di SD dan MI mengalami peningkatan yang sangat tajam selama periode ini. Biaya orang tua yang mengalami penurunan antara 2003 dan 2006 adalah MTs, tetapi pengurangan tersebut sangat kecil dan meningkat kembali secara signifikan antara 2006 dan 2009. Biaya yang disajikan pada Tabel 15 menggunakan rupiah nilai konstan tahun 2011, agar dapat diperbandingkan secara langsung dengan biaya survei ACDP.

Tabel 15. Rata-rata total biaya pendidikan dari orangtua untuk per siswa per tahun 2003 - 2009 (Rp nilai asli dan konstan tahun 2011)

Sekolah/madrasah	Rata-rata total biaya orangtua per tahun		
	2003	2006	2009
SD Negeri	294,864 (2003)	444,482 (2006)	829,708 (2009)
	366,426 (2011)	418,810 (2011)	655,580 (2011)
SD Swasta		976,676 (2006)	1,387,040 (2009)
		923,094 (2011)	1,095,058 (2011)
MI Negeri	273,234 (2003)	538,976 (2006)	841,750 (2009)
	339,546 (2011)	507,864 (2011)	665,102 (2011)
MI Swasta		509,474 (2006)	892,392 (2009)

Sekolah/madrasah	Rata-rata total biaya orangtua per tahun		
	2003	2006	2009
		480,048 (2011)	705,120 (2011)
SMP Negeri	758,876 (2003)	988,314 (2006)	1,310,782 (2009)
	943,060 (2011)	931,230 (2011)	1,035,700 (2011)
SMP Swasta		1,581,266 (2006)	1,768,982 (2009)
		1,489,132 (2011)	1,397,740 (2011)
MTs Negeri	600,172 (2003)	774,932 (2006)	1,270,802 (2009)
	745,834 (2011)	730,172 (2011)	1,004,112 (2011)
MTs Swasta		776,182 (2006)	1,261,060 (2009)
		731,352 (2011)	996,414 (2011)

Data dari Tabel 15 (di atas) muncul, menunjukkan bahwa pengenalan dana BOS tidak menimbulkan pengurangan kontribusi orangtua terhadap pendidikan. Tapi terbukti dengan Tabel 16, di bawah, data Susenas menunjukkan bahwa persentase orang tua yang tidak membayar biaya sekolah/madrasah sama sekali naik secara dramatis antara 2003 dan 2006, dan kemudian menurun drastis antara tahun 2006 dan 2009. Tampaknya dampak awal dari penyediaan dana BOS sangat kuat, meningkatkan harapan orangtua bahwa mereka akan dibebaskan dari membayar biaya. Perubahan antara 2006 dan 2009 menunjukkan bahwa orang tua dibujuk oleh sekolah/madrasah bahwa meskipun tersedia dana BOS, total sumberdaya sekolah/madrasah tidak mencukupi, dan bahwa kontribusi orang tua masih diperlukan.

Data dari survei ACDP menunjukkan bahwa proporsi orang tua yang tidak membayar biaya naik kembali pada tahun 2011 (lihat Tabel 5 dan 6 di atas), meskipun harus diingat bahwa sampel survei ini adalah terlalu kecil untuk merepresentasikan Indonesia. Alokasi per siswa dari dana BOS tidak berubah antara 2009 dan 2011. Suatu penjelasan yang mungkin terkait perubahan ini adalah penguatan kebijakan nasional dan daerah tentang pendidikan dasar gratis, dan publisitas tentang peningkatan dan penegakan kebijakan ini.

Tabel 16. Persentase orangtua yang tidak membayar iuran sekolah/madrasah 2003 – 2011 (Data Susenas: 2003-2009, Data Survey ACDP: 2011)

Jenis Sekolah/Madrasah	Persentase orangtua yang tidak membayar iuran			
	Susenas:2003-2009		ACDP: 2011	
	2003	2006	2009	2011
SD Negeri	6.9%	61.9%	17.7%	61.9%
SD Swasta		30.2%	9.2%	75.3%
MI Negeri	4.0%	59%	15.5%	58%
MI Swasta		42.9%	11.8%	59.4%
SMP Negeri	1.7%	32.8%	0%	82.7%
SMP Swasta		11.8%	0%	47.9%
MTs Negeri	1.2%	38.2%	0%	64.5%
MTs Swasta		28.8%	0%	29.2%

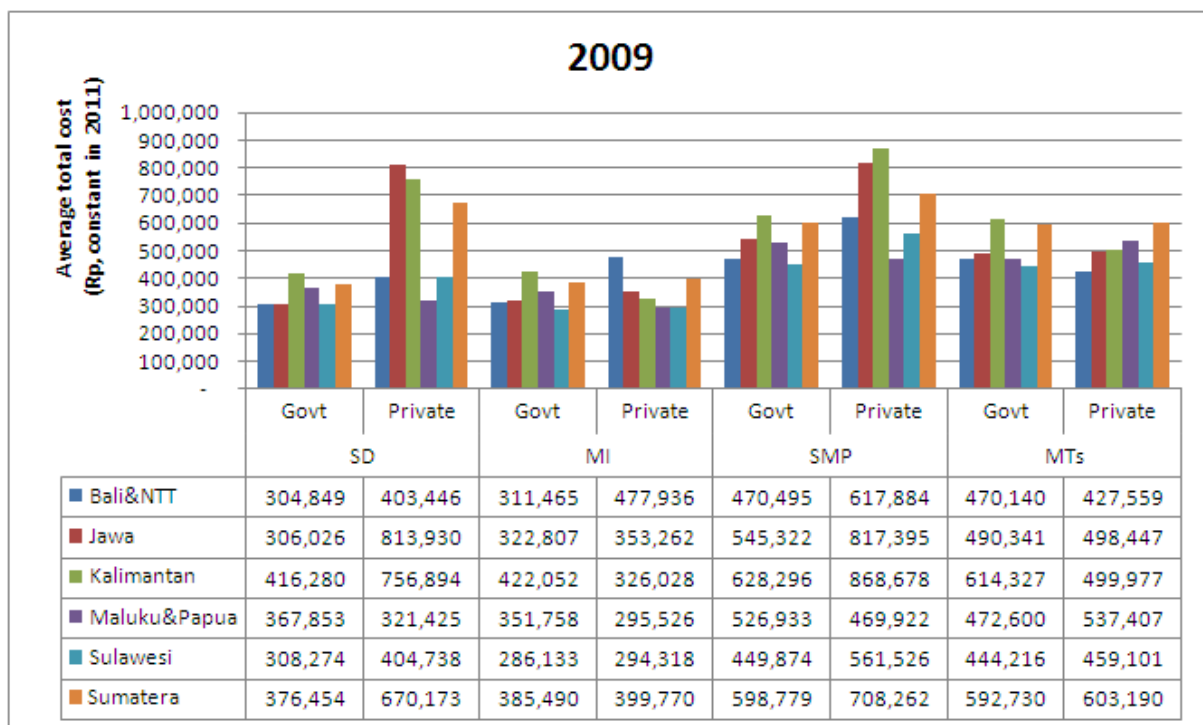
Analisis biaya orang tua menurut lokasi perkotaan dan pedesaan menunjukkan bahwa biaya untuk daerah perkotaan yang jauh lebih besar dibandingkan di daerah pedesaan untuk tahun 2003 dan 2006. Selisih tersebut berkurang tajam pada tahun 2009 karena biaya pedesaan meningkat tajam sementara biaya perkotaan tidak. Tidak jelas mengapa di daerah pedesaan total biaya orangtua mengalami perubahan antara tahun 2006 dan 2009, tetapi tidak berubah pada periode 2003 dan 2006.

Tabel 17. Rata-rata total biaya orangtua untuk pendidikan dasar menurut status desa periode 2003 - 2009 (Rp nilai konstan 2011)

Jenjang Pendidikan	Rata-rata total biaya orangtua per semester					
	2003		2006		2009	
	Status Desa		Status Desa		Status Desa	
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan
SD	279,052	114,703	359,336	157,431	354,935	336,428
MI	233,977	136,190	391,916	171,594	341,486	336,060
SMP	600,669	334,226	717,463	366,932	629,355	489,230
MTs	432,203	342,730	474,769	321,924	550,633	481,205

Ada juga variasi dalam biaya sesuai wilayah, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar (bawah). Data disajikan dalam rupiah nilai konstan 2011 agar dapat diperbandingkan.

Ilustrasi 2. Rata-rata total biaya orangtua untuk pendidikan dasar menurut wilayah

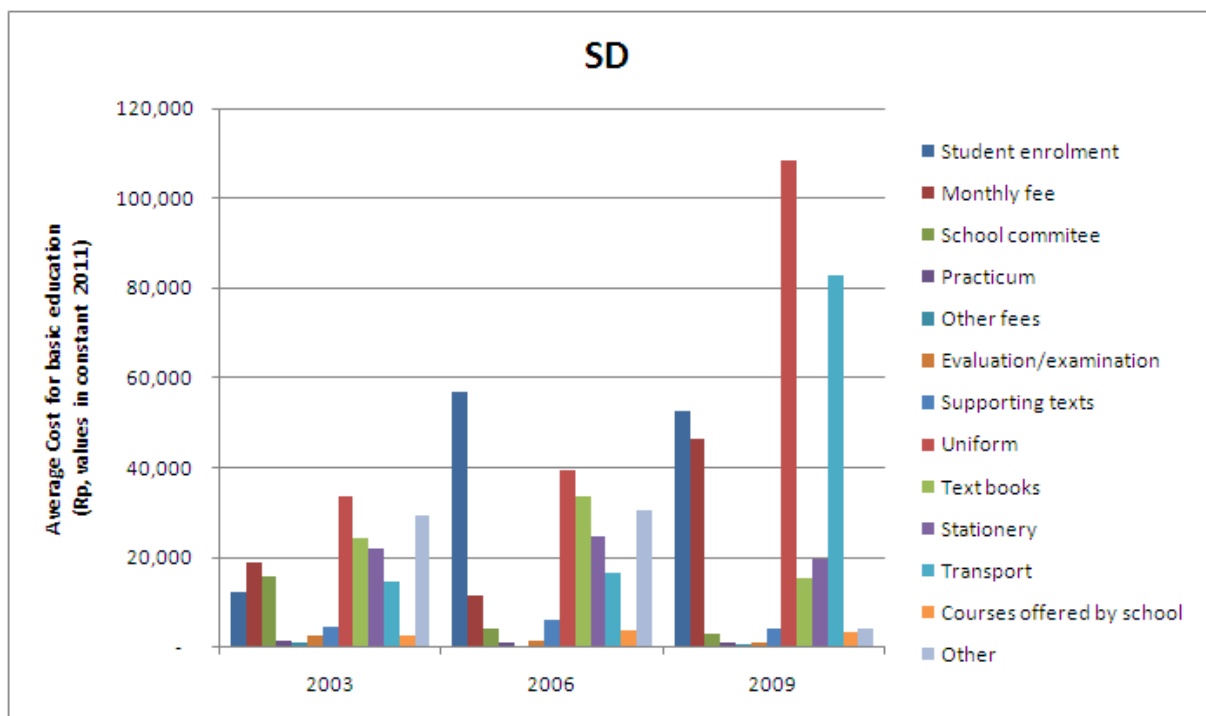


Data menunjukkan bahwa variasi terbesar dalam biaya menurut wilayah terjadi di tingkat SMP swasta dan SD swasta, dengan Maluku-Papua memiliki kontribusi orangtua terendah sedangkan Jawa dan Kalimantan yang tertinggi. Sementara itu yang lainnya, biaya orangtua untuk sekolah/madrasah menunjukkan beberapa variasi regional. Biaya yang ditanggung orangtua siswa

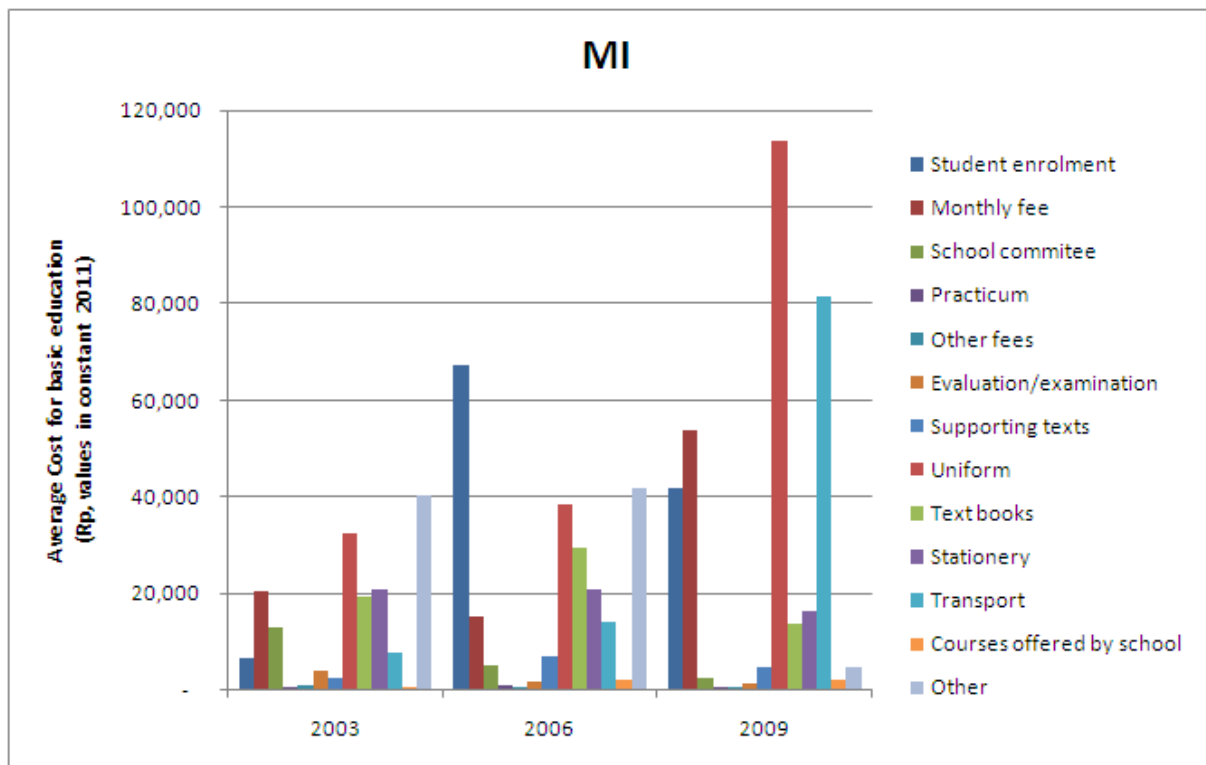
untuk pendidikan dasar negeri, baik di sekolah dan madrasah, umumnya menunjukkan tingkat konsistensi yang baik di seluruh wilayah.

Data Susenas juga dianalisis berdasarkan jenis biaya yang dibayarkan orang tua siswa. Biaya terbesar untuk kedua pendidikan dasar baik negeri dan swasta adalah untuk seragam sekolah dan transportasi, yang pada 2009 menyumbang masing-masing 32% dan 24% dari total pengeluaran. Biaya pendaftaran dan iuran bulanan siswa juga merupakan komponen biaya yang cukup besar dari pengeluaran, terutama di sekolah dan madrasah swasta. Beberapa jenis komponen biaya untuk tahun 2009 disajikan pada Ilustrasi 2 - 5.

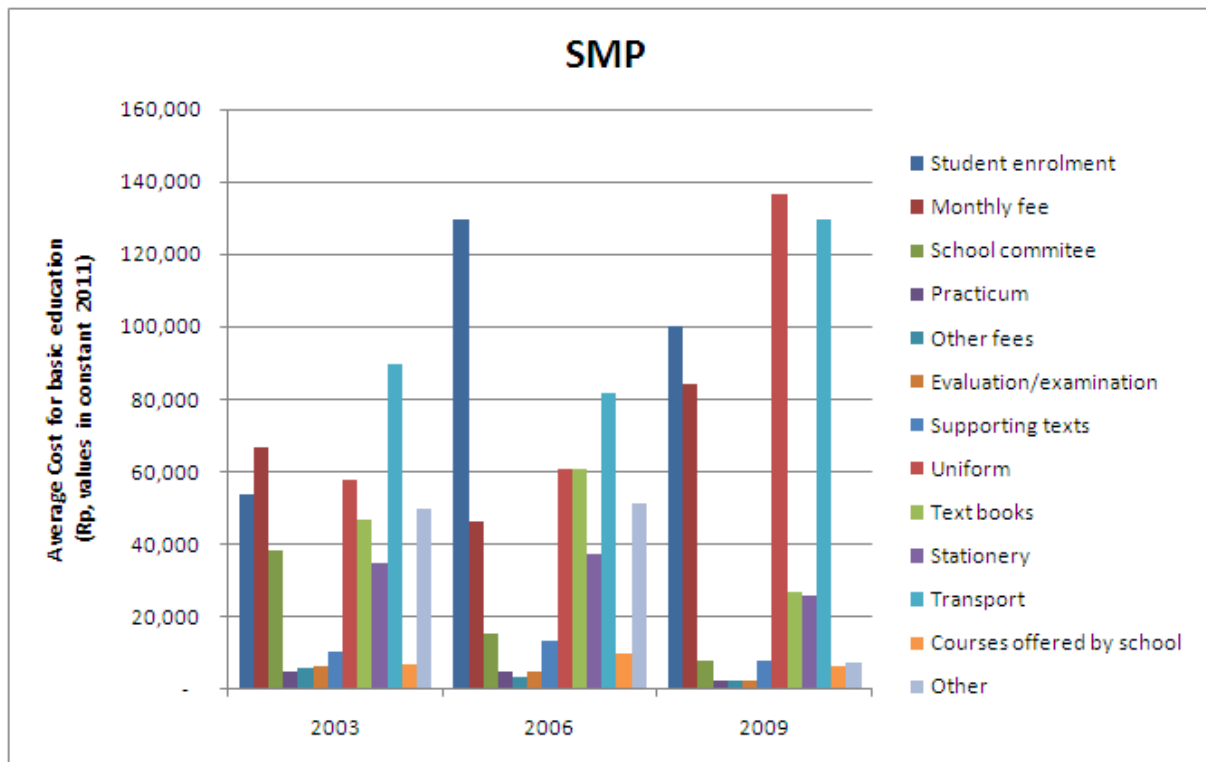
Ilustrasi 3. Jenis komponen biaya orangtua siswa SD, Susenas 2003 - 2009.



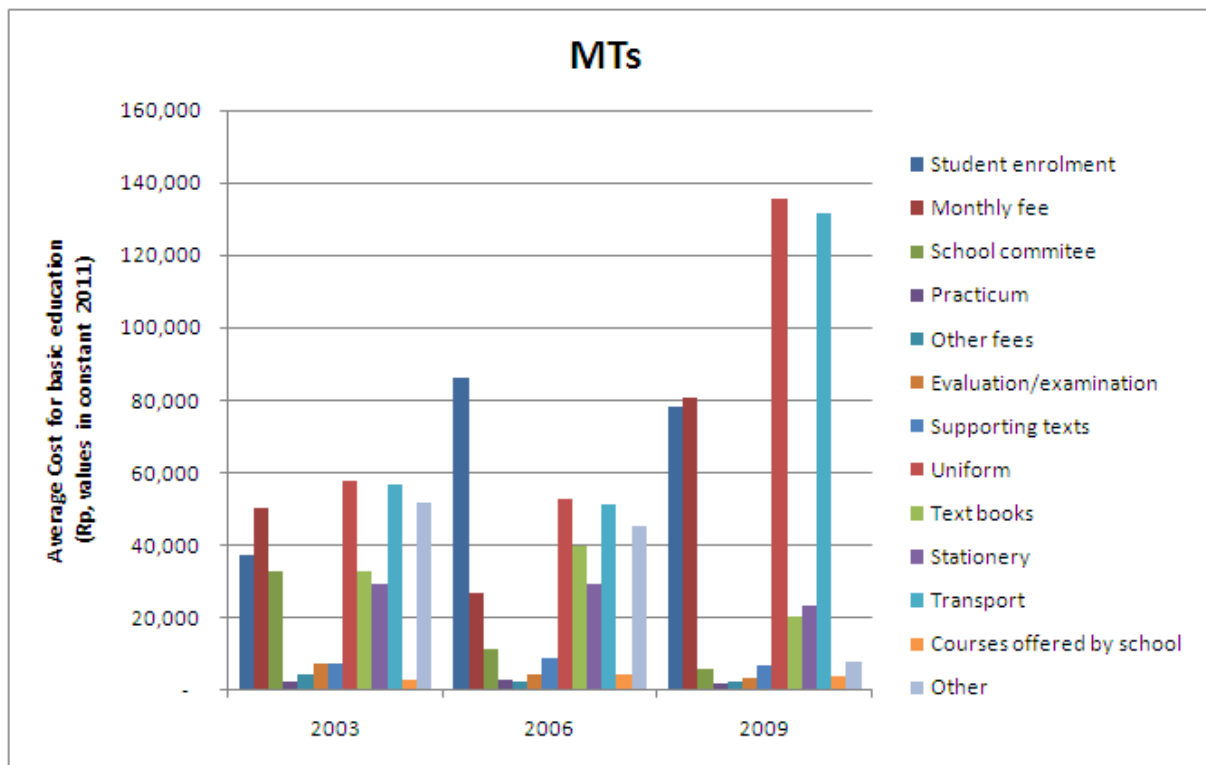
Ilustrasi 4. Jenis komponen biaya orangtua siswa MI, Susenas 2003 - 2009.



Ilustrasi 5. Jenis komponen biaya orangtua siswa SMP, Susenas 2003 - 2009.



Ilustrasi 6. Jenis komponen biaya orangtua siswa MTs, Susenas 2003 - 2009.



Data susenas juga memberikan informasi tentang perbedaan biaya orangtua antara daerah perkotaan dan pedesaan.

3.9. Persepsi kepala sekolah tentang dampak penghapusan iuran terhadap kualitas pendidikan

Para kepala sekolah ditanya tentang dampak penghapusan segala bentuk kontribusi orangtua terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan di sekolah/madrasah. Tabel 18, di bawah, memberikan ringkasan tanggapan mereka.

Tabel 18. Persepsi kepala sekolah tentang dampak penghapusan kontribusi orangtua terhadap kualitas pendidikan

Jenis Sekolah/ Madrasah	Status	Dampak negative dari penghapusan iuran terhadap kualitas pendidikan					Seluruhnya	
		Tidak memberikan respon	Tidak ada/sangat kecil	Kecil	Sedang	Besar		
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	n	(%)
MI	Negeri	11.8	35.3	11.8	29.4	11.8	17	100.0
	Swasta	.	34.8	21.7	26.1	17.4	23	100.0
MTs	Negeri	36.4	9.1	.	36.4	18.2	11	100.0
	Swasta	15.6	15.6	6.3	28.1	34.4	32	100.0
SD	Negeri	7.3	24.6	5.8	21.7	40.6	69	100.0
	Swasta	16.7	5.6	5.6	5.6	66.7	18	100.0
SMP	Negeri	18.2	15.2	9.1	30.3	27.3	33	100.0

Jenis Sekolah/ Madrasah	Status	Dampak negative dari penghapusan iuran terhadap kualitas pendidikan					Seluruhnya	
		Tidak memberikan respon	Tidak ada/sangat kecil	Kecil	Sedang	Besar		
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	n	(%)
	Swasta	20.0	4.0	12.0	20.0	44.0	25	100.0
Keseluruhan		13.2	19.3	8.8	24.1	34.7	228	100.0

Secara keseluruhan, 58,8% dari kepala sekolah menyatakan bahwa jika kontribusi orang tua dihapuskan berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang mereka tawarkan pada skala menengah atau besar. Level tertinggi dari keprihatinan itu diungkapkan oleh kepala sekolah dasar swasta yaitu 66,7% berpendapat bahwa dampaknya akan besar. Kekhawatiran bahwa dampaknya akan besar juga dikemukakan oleh kepala sekolah SMP swasta (44%) dan SD Negeri (40,6%). Kepala sekolah dari MTs Negeri (36,4%) mengatakan bahwa dampak penghapusan tidak ada atau sangat kecil. Perlu dicatat bahwa cukup besar persentase kepala sekolah yang tidak memberikan respon terhadap pertanyaan ini.

Dampak negative yang cukup besar yaitu pada standar fasilitas sekolah, pembayaran insentif guru, kegiatan ekstra kurikuler dan pengurangan kuantitas kegiatan pendidikan yang ditawarkan.

Tabel 19. Persentase kepala sekolah yang mengidentifikasi dampak negatif dari kualitas pendidikan akibat penghapusan kontribusi orang tua, menurut jenis dampak negatif (kepala sekolah dapat memilih lebih dari satu jenis dampak)

Jenis Sekolah/ Madrasah	Status	Fasili tas	Insentif/ Honor guru	Pengad aan Buku	Pengura ngan guru	Pengura ngan Kegiatan Pelajara n	Penguran gan Kegiatan Ekstrakur ikuler	Lain nya
		Persentase Kepala Sekolah yang Mengidentifikasi Dampak						
MI	Negeri	52.9 %	23.5%	17.6%	5.9%	29.4%	41.2%	5.9%
	Swasta	56.5 %	43.5%	21.7%	13.0%	30.4%	17.4%	0.0%
MTs	Negeri	45.5 %	27.3%	9.1%	0.0%	18.2%	27.3%	9.1%
	Swasta	56.3 %	37.5%	21.9%	9.4%	18.8%	31.3%	15.6 %
SD	Negeri	66.7 %	29.0%	27.5%	13.0%	26.1%	36.2%	1.4%
	Swasta	66.7 %	55.6%	16.7%	27.8%	16.7%	33.3%	0.0%
SMP	Negeri	63.6 %	18.2%	18.2%	12.1%	39.4%	36.4%	3.0%
	Swasta	64.0 %	60.0%	28.0%	16.0%	36.0%	36.0%	4.0%
Keseluruhan		61.4 %	35.1%	22.4%	12.7	27.6%	33.3%	4.4%

Para kepala sekolah dari seluruh sekolah/madrasah melaporkan dampak negatif yang signifikan pada bidang-bidang seperti fasilitas, tetapi sekolah dan madrasah swasta tampaknya jauh lebih terkena dampak dalam kemampuan mereka untuk membayar honor guru. Para Kepala sekolah ini juga menyatakan dampak pada kemampuan mereka untuk mempekerjakan guru lebih besar sekolah/madrasah negeri, meskipun dampak ini tidak terlalu parah, hal ini mengindikasikan bahwa strategi pengurangan remunerasi guru lebih disukai dibandingkan dengan mengurangi jumlah guru.

3.10. Hubungan antara anggaran sekolah, pendanaan orangtua dan hasil pembelajaran siswa

Studi ini juga mencoba menganalisis hubungan antara total biaya sekolah per-siswa, kontribusi orangtua, dan hasil proses belajar mengajar siswa yang diwakili oleh hasil ujian nasional siswa kelas 6 untuk SD/MI, dan siswa kelas 3 untuk SMP/MTs.

Untuk mengkaji hubungan tersebut dilakukan dengan analisis regresi, dimana sekolah/madrasah dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan pencapaian skor hasil belajar: rendah, sedang dan tinggi. Dari hasil analisis regresi diperoleh bahwa ada hubungan positif antara peningkatan biaya per-siswa dengan hasil pembelajaran baik untuk kelompok sekolah/madrasah skor sedang dan tinggi, tetapi tidak untuk kelompok skor rendah, sesuai Tabel 20 di bawah ini. Ini berarti bahwa sekolah/madrasah yang skor ujian nasionalnya rendah dapat memiliki total biaya per siswa rendah, sedang atau tinggi.

Tabel 20. Hubungan antara total biaya per siswa dengan hasil pembelajaran

	Hasil Ujian Nasional Rendah	Hasil Ujian Nasional Sedang	Hasil Ujian Nasional Tinggi
Hubungan antara total biaya per siswa dengan hasil ujian	Tidak ada hubungan	Hubungan positif	Hubungan positif

Hal ini tidak mungkin untuk menyimpulkan bahwa biaya per-siswa yang lebih tinggi merupakan faktor penyebab hasil belajar yang lebih baik pada kelompok sekolah/madrasah dengan skor ujian sedang dan tinggi. Pendanaan sekolah/madrasah yang baik umumnya diikuti oleh siswa yang berasal dari keluarga kaya dan lebih berpendidikan. Literatur internasional mengidentifikasi tingkat pendidikan orang tua dan status sosial ekonomi sebagai prediktor terkuat hasil proses belajar siswa. Hal ini sangat mungkin bahwa anggaran total lebih tinggi dan kontribusi orang tua lebih tinggi di sekolah/madrasah yang hasil belajarnya lebih baik dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa siswa dari sekolah/madrasah tersebut berasal dari keluarga berpendidikan lebih baik dan kaya. Juga harus dicatat bahwa ada "pengaruh langit-langit" (*ceiling effect*), yaitu hukum pengurangan peningkatan hasil dalam hubungan antara peningkatan total biaya per-siswa dan peningkatan hasil belajar. Dimana suatu hubungan kausal, kemungkinan akan lebih kuat terjadi di kisaran pertengahan dari total biaya per-siswa, daripada di kisaran biaya bagian atas.

Analisis ini tidak dapat mengidentifikasi dampak yang berbeda dari dana pemerintah atau orangtua terhadap hasil belajar siswa. Tidak ada perbedaan yang tajam antara sekolah/madrasah yang mendapat proporsi dana orangtua yang lebih tinggi dengan sekolah/madrasah yang mendapatkan total anggaran yang sama tetapi proporsi orangtua yang tidak bayar lebih tinggi.

4. KESIMPULAN

Orang tua dari anak-anak di lembaga pendidikan dasar di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap biaya pendidikan anak-anak mereka, ketika kontribusi untuk sekolah dan biaya pribadi diperhitungkan. Data dari Susenas menunjukkan bahwa tren biaya-biaya meningkat secara riil sejak 2003, di setiap jenis sekolah/madrasah, meskipun pemerintah nasional meningkatkan pembiayaan operasional sekolah melalui pemberian dana BOS. Tidak jelas mengapa laju kenaikan telah lebih tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan sekolah/madrasah.

Meningkatnya biaya pribadi yang dibayarkan orangtua, mungkin diakibatkan oleh laju inflasi yang tinggi. Berdasarkan perkiraan pertumbuhan pendapatan rata-rata, orangtua Indonesia kemungkinan akan memberikan anak-anak mereka kualitas pendidikan yang lebih baik, termasuk buku-alat tulis dan pakaian. Hal ini juga dapat diharapkan bahwa akan ada peningkatan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler pilihan dan karya wisata. Biaya transportasi juga cenderung meningkat. Bagi orang tua miskin situasi ini akan semakin membebani, yang akan membutuhkan respon kebijakan pemerintah. ACDP 006 bekerja pada masalah ini dan akan menghasilkan sebuah makalah tentang Kebijakan Pro-Miskin.

Selama dekade terakhir, telah terjadi fluktuasi yang signifikan dalam proporsi biaya orang tua yang dibayarkan ke sekolah/madrasah. Sebelum pengenalan dana BOS, hampir semua orang tua membayar iuran sekolah. Pada tahun 2006, setahun setelah pengenalan pendanaan ini, proporsi biaya orang tua yang membayar menurun drastis, namun meningkatkan kembali pada tahun 2009. Data dari 2011 menunjukkan bahwa proporsi orang tua membayar biaya telah menurun lagi.

Gejolak pada pola ini kemungkinan disebabkan oleh dampak dari kebijakan pemerintah. Pengenalan awal BOS yang telah berhasil membuat banyak orang tua percaya bahwa sekolah/madrasah tidak memerlukan lagi kontribusi mereka untuk biaya operasi. Pada 2009, mereka tampaknya telah yakin bahwa kontribusi mereka masih dibutuhkan, tetapi dengan 2011-2012, pemerintah di semua tingkatan aktif mempromosikan kebijakan "pendidikan dasar gratis", banyak yang lagi berhenti membayar iuran.

Perlu dicatat bahwa meskipun terjadi perubahan proporsi orang tua membayar biaya sekolah, tetapi rata-rata kontribusi biaya orangtua terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa mereka yang membayar telah membayar jauh lebih tinggi.

Survei ACDP menunjukkan bahwa ada perbedaan besar antara apa yang biaya untuk sekolah/madrasah yang dilaporkan oleh orang tua, dengan penerimaan yang dilaporkan oleh lembaga sekolah/madrasah. Data survei secara umum konsisten dengan data dari Susenas, dengan peningkatan pembayaran total biaya orangtua yang dilaporkan pada tahun 2011 sejalan dengan kecenderungan meningkatnya kontribusi orang tua sejak tahun 2003. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa sekolah/madrasah tidak melaporkan secara akurat kontribusi dana yang diterima dari orang tua. Hampir setengah dari dana yang mereka terima dari orang tua dilaporkan akan dihabiskan untuk biaya kegiatan "lainnya".

Ketentuan yang berlaku bagi sekolah/madrasah untuk merekam semua kontribusi yang diterima dari orang tua sudah ada, seperti persyaratan untuk melaporkan bagaimana kontribusi digunakan, tetapi persyaratan ini tidak ditegakkan. Dalam konteks di Indonesia, penting bahwa semua pembayaran orang tua, terlepas dari saluran yang digunakan, dicatat dan dilaporkan. Saluran ini termasuk pembayaran yang dilakukan kepada komite sekolah dan langsung ke guru kelas.

Sulit untuk memprediksi pola pembayaran kepada sekolah/madrasah di masa yang akan datang. Konteks kebijakan bagi sekolah-sekolah pemerintah saat ini sudah jelas - itu diatur oleh Peraturan Menteri 44/2012 yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah negeri menyediakan pendidikan dasar tanpa pungutan biaya. Implikasi untuk sistem madrasah belum diklarifikasi, tapi madrasah negeri cenderung mengikuti sekolah-sekolah negeri. Ini berarti bahwa dalam sistem pemerintah, sekolah dan madrasah akan hanya bergantung pada kontribusi sukarela orang tua. Berapa besar kontribusi sukarela tersebut akan tergantung pada beberapa faktor. Beberapa kunci di antaranya:

- kepercayaan orangtua bahwa kontribusi mereka akan digunakan dengan baik
- meningkatnya transparansi sekolah/madrasah melaporkan penerimaan dan pengeluaran dari dana orangtua; dan
- efektivitas pengelola sekolah dalam menjelaskan kepada orang tua tentang kebutuhan dana tambahan terhadap dana yang disediakan oleh pemerintah.

Juga harus dicatat bahwa sekolah/madrasah sudah memiliki metode untuk membujuk beberapa orang tua untuk memberikan kontribusi, yang pada prinsipnya bersifat "sukarela", namun cenderung menekan. Tujuan kebijakan jangka panjang ini harus diganti dengan strategi yang lebih transparan dan akuntabel untuk mencari dukungan orang tua.

Sekolah swasta diizinkan oleh Peraturan Menteri 44/2012 untuk memungut biaya, dengan batasan untuk apa biaya itu digunakan. Iuran dapat digunakan untuk membiayai gaji guru yang bukan pegawai pemerintah dan untuk menyediakan barang operasional dan jasa khususnya untuk sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Pendidikan Nasional. Peraturan tersebut mengharuskan pelaporan penuh penerimaan dan penggunaan dana orangtua. Orangtua murid yang miskin harus dibebaskan. Dalam prakteknya, hampir tidak ada sekolah/madrasah yang belum memenuhi semua kriteria Standar Pendidikan Nasional, dan iuran kemungkinan akan ditetapkan pada tingkat tertentu, yang dianggap tepat oleh pengelola sekolah, mungkin dekat dengan level saat ini.

LAMPIRAN 1
IMPLEMENTASI KEGIATAN SURVEY

LAMPIRAN 1 IMPLEMENTASI KEGIATAN SURVEI

Kegiatan survey kontribusi orangtua untuk pendidikan dasar dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu:

- Persiapan
- Uji Coba kuesioner
- Pemilihan objek survey
- Pelatihan Supervisor/Surveyor
- Administrasi dan Perijinan
- Pelaksanaan survey lapangan
- Penanganan dokumen dan data entry

Penjelasan masing-masing sub kegiatan akan dijabarkan lebih lanjut dalam sub bab dibawah ini.

1. Tahap Persiapan

Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam tahap persiapan antara lain

- a. Pengumpulan data sekolah (Diknas), data karakteristik wilayah dan data susenas (BPS),
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Kemendiknas, Kemendiknas dan Bappenas),
- c. Penyusunan instrument survey (kuesioner dan panduan pengisian kuesioner).

Kuesioner survey dalam kegiatan ini dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

a. Kuesioner untuk orangtua

Kuesioner untuk orangtua siswa ditujukan untuk memperoleh data/informasi tentang kontribusi, dan khususnya kontribusi keuangan, orang tua siswa sepanjang tahun kalender terakhir. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner terbuka dan tertutup.

b. Kuesioner untuk sekolah

Kuesioner untuk sekolah ditujukan untuk memperoleh data / informasi tentang jenis dan jumlah kontribusi orangtua yang diterima sekolah selama tahun kalender terakhir (Jan-Des 2011). Fokus utamanya adalah mengidentifikasi besarnya dukungan keuangan yang diperoleh dari orang tua siswa, dan bagaimana uang ini digunakan oleh sekolah. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner terbuka dan tertutup.

Rancangan kedua jenis kuesioner disajikan dalam Lampiran d-g dalam CD.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara parallel mulai bulan Desember-Maret 2012, dibawah koordinasi Christ Majewski.

2. Uji Coba Kuesioner

Untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas kuesioner akan dilakukan melalui uji coba kuesioner. Lokasi uji coba kuesioner akan dilakukan disekitar Jakarta dengan jumlah responden sekitar 30-50 orang tua siswa. Dalam uji coba ini juga dievaluasi tentang pemahaman responden

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam kuesioner. Ujicoba selain untuk melakukan testing kuesioner juga dimaksudkan untuk melatih para calon master trainers, yang akan melatih surveyor kabupaten/kecamatan) dengan pengalaman lapangan/benar-benar melakukan survey lapangan).

Kegiatan uji coba kuesioner orangtua siswa dilaksanakan oleh tim peneliti (Chris M., Robert Suharno dan I Made Sumertajaya) di Jakarta dan Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan pada 1-7 April 2012.

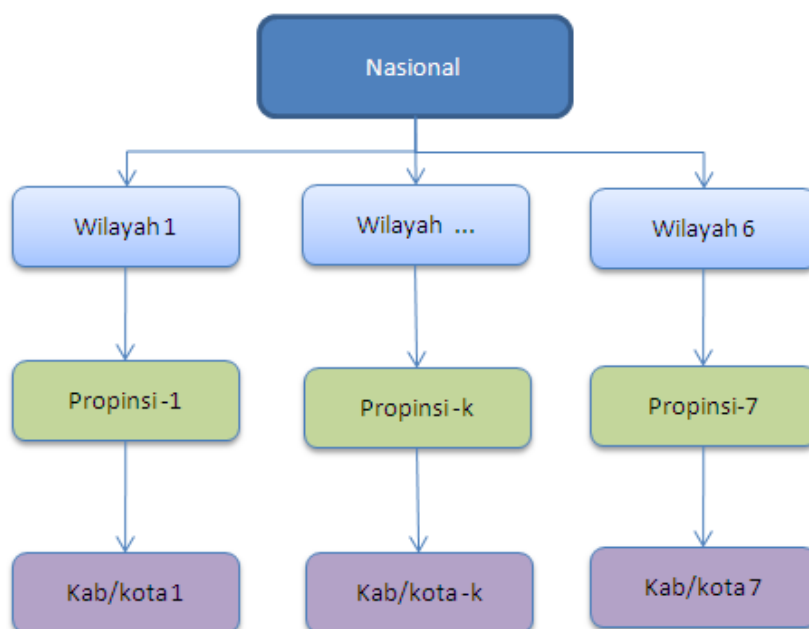
Sedangkan uji coba kuesioner sekolah dilaksanakan terhadap 6 sekolah/madrasah di wilayah Jabodetabek. Uji coba ini dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 di Kantor ACDP, Kompleks Lotte Mart Blok G No 32, Jalan Fatmawati, Jakarta. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh I Made Sumertajaya, yang dibantu oleh Amril Muhammad (Universitas Negeri Jakarta).

3. Pemilihan Objek Survei

Objek survey dalam kegiatan ini adalah pemda (dinas pendidikan, dan kantor kementerian agama), sekolah dan orang tua siswa. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *multi stage stratified random sampling*. Tahapan pemilihan sampel dilakukan sebagai berikut: (1) pemilihan provinsi, (2) pemilihan kabupaten/kota pada provinsi terpilih, (3) pemilihan sekolah pada masing-masing kabupaten/kota terpilih, dan (4) pemilihan orang tua siswa pada masing-masing sekolah terpilih.

Untuk menghindari terjadi *bias* pada sampel yang diperoleh, pemilihan sampel hendaknya memperhatikan karakteristik dari populasi yang dihadapi. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan pada masing-masing tahapan pengambilan sampel yaitu:

Ilustrasi 7. Sampling pemilihan provinsi dan kabupaten/kota



1. Pemilihan provinsi dilakukan pada masing-masing wilayah (Sumatera, Jawa, Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua). Pada setiap wilayah dipilih secara acak 1-2 provinsi secara proporsional.

2. Pada setiap provinsi terpilih, selanjutnya dipilih secara acak 1-2 kabupaten/kota. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan antara lain keterwakilan status wilayah (kabupaten/kota) dan keterwakilan strata menurut ekonomi dan jumlah layanan pendidikan dasar.

Berdasarkan metodologi yang dikembangkan di atas, propinsi dan kabupaten/kota yang terpilih sebagai lokasi survey dapat dilihat pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21. Daftar sampel provinsi dan kabupaten/kota

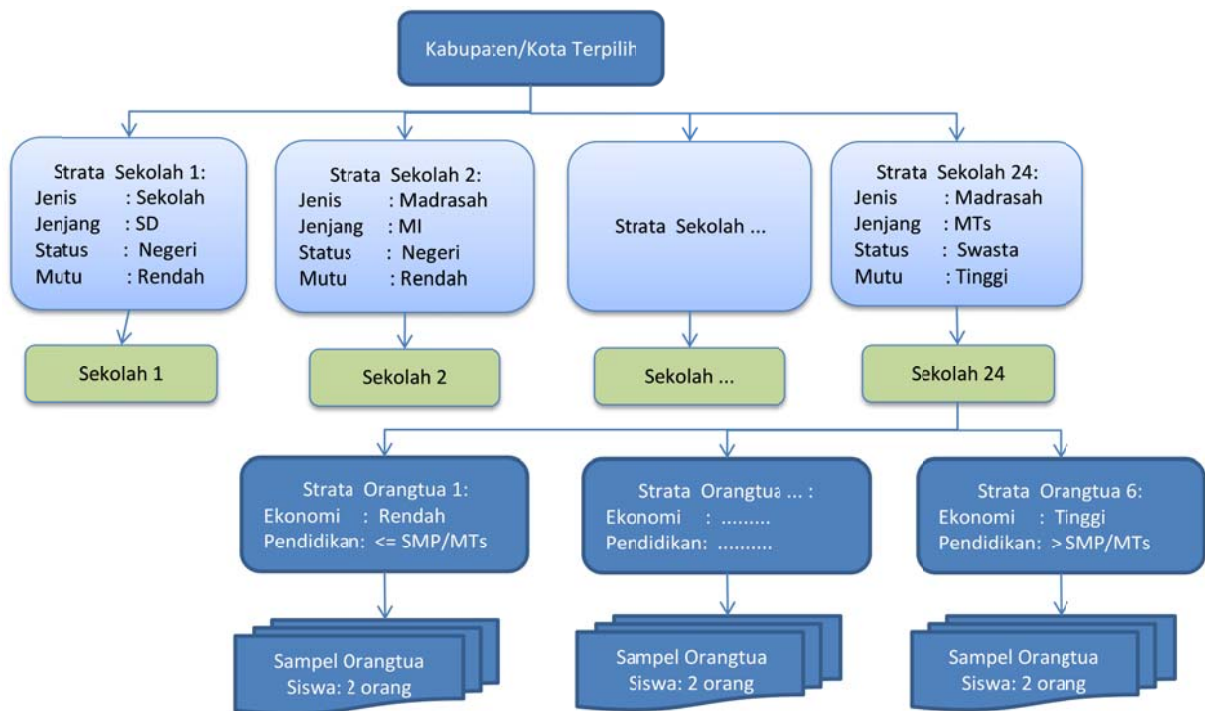
Wilayah	Kode Prov	Provinsi	Kode Kab	Kabupaten/Kota
SUMATERA	13	SUMATERA BARAT	1371	PADANG
			1301	KEPULAUAN MENTAWAI
	17	BENGKULU	1703	BENGKULU UTARA
JAWA	35	JAWA TIMUR	3578	SURABAYA
BALI DAN NUSA TENGGARA	51	B A L I	5108	BULELENG
KALIMANTAN	63	KALIMANTAN SELATAN	6303	BANJAR
SULAWESI	73	SULAWESI SELATAN	7311	BONE
			7303	BANTAENG
MALUKU&PAPUA	81	M A L U K U	8103	MALUKU TENGAH

3. Pemilihan sekolah pada masing-masing kabupaten/kota terpilih memperhatikan beberapa hal yaitu jenis sekolah (sekolah dan madrasah), jenjang sekolah (SD atau sederajat, SMP atau sederajat), status sekolah (negeri, swasta), mutu sekolah (A, B, C), sekolah/madrasah di daerah perkotaan, perdesaan, terpencil, di daerah pulau, sekolah kaya atau sekolah miskin dan lain-lain.

4. Pemilihan sampel orang tua siswa pada masing-masing sekolah memperhatikan latar belakang ekonomi dan pendidikan orang tua, dan orang tua dari siswa yang tidak bersekolah di sekolah yang tidak terpilih tetapi bertempat tinggal di sekitar sekolah terpilih.

Secara ringkas, tahapan pemilihan objek survey point (3) dan (4) disajikan pada Gambar berikut:

Ilustrasi 8. Sampling of schools and parents' selection



Ukuran Sampel

Penentuan ukuran sampel pada masing-masing tahapan dilakukan dengan metode quota dengan mempertimbangkan keterwakilan setiap strata, waktu dan biaya yang tersedia. Distribusi jumlah sampel untuk setiap jenis objek survey adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Perhitungan jumlah sampel sekolah dan orang tua siswa pada setiap provinsi dan kabupaten terpilih

Kode Prov.	Provinsi	Kode Kab.	Kabupaten/Kota	Jumlah sampel sekolah	Jumlah sampel orangtua siswa
01	SUMATERA BARAT	01	KOTA PADANG	24	288
		02	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	24	288
02	BENGKULU	03	KAB. BENGKULU UTARA	24	288
03	JAWA TIMUR	04	KOTA SURABAYA	24	288
		05	KAB. LAMONGAN	24	288
04	BALI	06	KAB. BULELENG	24	288
05	KALIMANTAN SELATAN	07	KAB. BANJAR	24	288
06	SULAWESI SELATAN	08	KAB. BONE	24	288
		09	KAB. BANTAENG	24	288
07	MALUKU	10	KOTA TUAL	24	288
			TOTAL	240	2880

Keterangan: *) 24 strata sekolah dan dipilih 1 sekolah pada masing-masing strata

**) 6 strata orang tua siswa dan dipilih 2 orang tua pada setiap strata

4. Pelatihan Supervisor dan Surveyor

Kegiatan pelatihan diperlukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi mengenai teknis pelaksanaan survei dan output yang akan dihasilkan.

Kegiatan pelatihan dilakukan 2 tahap yaitu (1) pelatihan koordinator wilayah dan (2) pelatihan surveyor lapangan.

Pelatihan koordinator wilayah akan dilaksanakan di Jakarta. Banyaknya coordinator wilayah yang akan diundang ke Jakarta sebanyak 7 orang, yang mewakili 7 provinsi terpilih. Selanjutnya kegiatan pelatihan terhadap para surveyor lapangan dilakukan pada masing-masing provinsi, yang akan dilatih oleh koordinator wilayah yang telah dilatih di Jakarta. Banyaknya peserta pelatihan pada masing-masing wilayah sebanyak 2 orang surveyor.

Dalam pelatihan tersebut diberikan pendalaman materi kegiatan kepada para surveyor antara lain mengenai gambaran umum kegiatan survei, dasar hukum kegiatan, metoda pengumpulan data/pengisian kuesioner, dan etika/tata cara wawancara. Untuk meningkatkan pemahaman peserta training terhadap materi yang disampaikan, akan dilakukan dengan uji coba pengisian kuesioner. Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka diharapkan surveyor mampu melakukan wawancara dengan memperhatikan tata cara wawancara. Pengumpulan data dari objek survei terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara petugas surveyor dengan responden.

Kegiatan pelatihan supervisor dilakukan pada tanggal 13 April 2012 bertempat di D'Best Komplek Pertokoan Lotte Mart Blok G-32, Jakarta.

Tabel 23. Susunan acara kegiatan training Supervisor

SESI	PUKUL	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
I	09.00-09.15	REGISTRASI SUPERVISOR	APRIANI WULANDARI
	09.15-09.45	PENGANTAR TENTANG SURVEI KONTRIBUSI ORANGTUA	CHRIS MAJEWSKI
	09.45-10.30	TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEI	CHRIS MAJEWSKI/I MADE SUMERTAJAYA
	10.30-11.30	DISKUSI: PENGISIAN KUESIONER ORANG TUA	CHRIS MAJEWSKI/I MADE SUMERTAJAYA
	11.30-13.00	I S H O M A	
II	13.00-14.00	DISKUSI: PENGISIAN KUESIONER SEKOLAH	CHRIS MAJEWSKI/ I MADE SUMERTAJAYA
	14.00-15.00	DISKUSI	CHRIS MAJEWSKI/ I MADE SUMERTAJAYA
	15.00-16.00	DISKUSI: ADMINISTRASI	ARI AGUNG

Pembagian tugas masing-masing supervisor lapangan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Jumlah sekolah dikunjungi pada setiap kabupaten/kota sebanyak 24 sekolah dengan karakteristik sekolah tertentu dan pada setiap sekolah di data 12 orangtua siswa dengan karakteristik tertentu.

Tabel 24. Daftar wilayah survey untuk masing-masing supervisor

No	Lokasi	Nama & Telp.	Jumlah Objek Survey
1	Kota Padang, Kab. Kep. Mentawai – Sumatera Barat	Asep Ahmad Satori (081326800968)	48 sekolah, 576 orangtua
2	Kab. Bone, Kab. Bantaeng – Sulawesi Selatan	Triswanto Nuratmodjo (082179003388)	48 sekolah, 576 orangtua
3	Kota Surabaya, Kab. Lamongan – Jawa Timur	Fahmi Hasan Bakran (085724163456)	48 sekolah, 576 orangtua
4	Kab. Buleleng - Bali	Boy Ishak (081280500299)	24 sekolah, 288 orangtua
5	Kab. Bengkulu Utara – Bengkulu	TB Sastra Mulyana (085218360603)	24 sekolah, 288 orangtua
6	Kota Tual – Maluku	Jajat Sudrajat (085693333312)	24 sekolah, 288 orangtua
7	Kab. Banjar - Kalimantan Selatan	Dede Sopyandi (081219018086)	24 sekolah, 288 orangtua

5. Administrasi dan Perijinan

Perijinan sangat penting agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Perijinan yang dimaksud terdiri dari:

a. Perijinan Tingkat Pusat (Diknas, Kemenag, Depdagri)

Perijinan dari pusat harus diperoleh sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan. Pusat selanjutnya akan menunjuk tingkat pemerintahan dibawahnya untuk menindaklanjuti surat perijinan kegiatan yang dikeluarkan tersebut. Ijin ini penting sebagai dasar terhadap kegiatan survey.

b. Perijinan Tingkat Kota/Kabupaten

Perijinan pada tingkat Kabupaten/ kota ini sebagai bentuk kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah / Kota.

c. Perijinan dari Stakeholder Terkait

Karena beberapa objek survey pada kegiatan ini merupakan mitra dari lembaga tertentu seperti lembaga keagamaan NU, Muhammadiyah, dll.

6. Pelaksanaan Survei Lapangan

Survey lapang dilakukan selama 12 hari mulai tanggal 11 Mei 2012 sampai tanggal 23 Mei 2012. Pembagian wilayah survey.

Tabel 25. Jadwal pelaksanaan survey lapangan

WAKTU	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
7-8 Mei 2012	Persiapan Survey	
	a. Surat Pengantar/Tugas	Dety/Wulan
	b. Daftar Sekolah yang disurvei dan daftar sekolah cadangan	I Made Sumertajaya
	c. Perbanyak Kuesioner (Form A1, Form A2, Form B1, Form B2)	TIA (Ela/Ari/Wulan)
	d. Pengadaan Tiket keberangkatan Supervisor ke lapangan (Jadwal keberangkatan di atur tanggal 10 Mei 2012)	TIA (Ela/Ari/Wulan)
	d. Pengadaan Tiket keberangkatan tim counterpart ke lapangan (Jadwal keberangkatan di atur antara tanggal 13-18 Mei 2012)	TIA (Ela/Ari/Wulan)
	e. Dana pelaksanaan kegiatan survey	TIA (Ela/Ari/Wulan)
	f. Souvenir untuk objek survey	TIA (Ela/Ari/Wulan)
8 Mei 2012	Mengundang tim Counterpart ke kantor ACDP di D'Best Komplek Lotte Mart	Dety/Wulan
9 Mei 2012	Mengundang Supervisor ke Kantor ACDP di D'Best Komplek Lotte Mart untuk mengambil perlengkapan dan perbekalan survey	TIA (Ela/Ari/Wulan)
10 Mei 2012	Supervisor berangkat ke masing-masing wilayah survei	Supervisor
	Supervisor mengumpulkan dan memberikan training surveyor	Supervisor
11 Mei 2012	Supervisor bersama surveyor berkunjung ke kantor dinas pendidikan, kantor agama pada level provinsi dan kabupaten/kota	Supervisor
11-23 Mei 2012	Pelaksanaan Survey	Supervisor
	a. Surveyor melakukan pendataan ke Sekolah	Surveyor
	b. Surveyor melakukan pendataan ke orangtua siswa	Surveyor
	c. Supervisor melakukan pendampingan pada hari pertama kunjungan ke sekolah dan orangtua	Supervisor
	d. Supervisor melaksanakan proses kualiti kontrol terhadap pelaksanaan survey (kunjungan secara berkala ke objek survei)	Supervisor
	e. Pengumpulan kuesioner yang sudah terisi dan melakukan validasi isian kuesioner	Supervisor
	f. Mengkoordinasikan data entri	Supervisor
	g. Mendampingi tim counterpart melakukan supervisi lapangan	Supervisor
13-20 Mei 2012	Supervisi tim counterpart di lapangan	Dety/Wulan

WAKTU	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB
24 Mei 2012	Supervisor kembali ke Jakarta	Supervisor
	a. Menyerahkan dokumen kebijakan	
	b. Menyerahkan kuesioner sekolah yang sudah terisi dan dokumen pendukung	
	c. Menyerahkan kuesioner orangtua siswa yang sudah terisi	
	d. Menyerahkan softcopy database sekolah dan orangtua siswa	
	e. Menyerahkan dokumen administrasi	

Panduan pengumpulan data di lapangan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Secara garis besarnya terdapat 3 kegiatan utama yang dilakukan di lapangan yaitu inventarisasi peraturan/kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing wilayah, pengumpulan data di sekolah (Kuesioner A) dan pengumpulan data partisipasi orangtua untuk pendidikan (Kuesioner B).

Tabel 26. Jenis data yang dikumpulkan pada masing-masing responden

Data	Responden	Pendekatan Komunikasi	Instrument	Pewawancara
Peraturan/Kebijakan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan	-Kanwil Pendidikan (7 provinsi), Dinas Pendidikan (10 kabupaten), Kantor Agama (10 kabupaten)	Dokumentasasi / Inventarisasi	Panduan Pengumpulan dokumen	Supervisor provinsi (7 orang)
Sumber, jenis dan penggunaan dana yang dikelola sekolah	240 sekolah, yang mewakili beberapa karakteristik sekolah seperti jenis sekolah (Sekolah, Madrasah), status sekolah (Negeri, Swasta), tingkat pendidikan dasar (SD/Sederajat, SMP/Sederajat), dan mutu sekolah (Rendah, Sedang, Tinggi)	Bertanya dan survei	Kuesioner terbuka dan tertutup	Supervisor provinsi (7 orang), Surveyor (20 orang)
Kontribusi orangtua siswa yang meliputi jenis, sifat, periode dan jumlah sumbangan yang diberikan ke pihak sekolah.	4,032 orang tua siswa (12 orang per sekolah)	Bertanya dan survei	Kuesioner terbuka dan tertutup	Surveyor (28 orang)

Daftar tugas dan tanggungjawab masing-masing supervisor dan surveyor dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 27. Rincian tugas masing-masing Supervisor wilayah

NO	URAIAN KEGIATAN
1	Pelatihan metodologi survey di Jakarta
2	Melatih supervisor kabupaten/kota dan surveyor lapangan
3	Mengumpulkan dokumen kebijakan/peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di Kanwil dan Kantor Agama Provinsi
4	Mengumpulkan dokumen kebijakan/peraturan daerah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di dinas pendidikan dan Kantor Agama kabupaten/kota
5	Mendampingi surveyor di lapangan pada hari pertama
6	Mengumpulkan kuesioner sekolah dan orang tua yang telah diisi oleh surveyor secara berkala
7	Quality control: <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kelengkapan dokumen dari kabupaten - Uji petik: telpon ke 10% responden
8	Validasi Data: <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kelengkapan dan keabsahan isian kuesioner
9	Data Entry: <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa kesesuaian isi kuesioner dengan data entry
10	Mengirimkan dokumen dan data entry ke Jakarta

Tabel 28. Rincian tugas masing-masing Surveyor lapangan

NO	URAIAN KEGIATAN
1	Pelatihan metodologi survey di provinsi
2	Melakukan survey ke 24 sekolah dan 12 orang tua per sekolah.
3	Mengumpulkan dokumen ke supervisor provinsi

7. Penanganan Dokumen Hasil Pendataan

Penanganan Dokumen adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur distribusi dokumen dan data hasil kegiatan. Dokumen yang diperoleh dari hasil pendataan dan survey yaitu kumpulan form-form pendataan dan survey yang sudah terisi perlu penanganan lebih lanjut agar kualitas data yang diperoleh secara langsung di lapangan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu perlu adanya proses verifikasi dan validasi dokumen dalam rangka menjamin kelengkapan isi dari form kuisisioner dan validitas dari data yang diperoleh. Selain itu untuk mempercepat proses data entry, pelaksanaan handling dokumen sangat diperlukan.

Metode QA/QC

Kegiatan QA/QC dilakukan sebagai bentuk control terhadap kualitas data yang diperoleh dari lapangan. Ruang lingkup kegiatan QA/QC adalah uji petik dan validasi data.

3.1. Uji Petik

Pelaksanaan kegiatan uji petik meliputi kegiatan survey sekolah, dan survey kontribusi orang tua. Besaran masing-masing objek uji petik ditetapkan dengan metode sampling. Jumlah sample per objek sebanyak 15% dari jumlah objek sasaran di setiap kabupaten. Dalam pelaksanaannya uji petik dilakukan per surveyor atau verifikator dengan jumlah sampel sebanyak 15% dari total pekerjaan yang sudah diselesaikan.

Metode kegiatan uji petik yang bisa dilakukan dalam pekerjaan ini antara lain:

1. RecTotal by Phone: yaitu uji petik yang dilakukan dengan cara menanyakan ulang responden melalui telepon proses yang dilakukan oleh seorang surveyor atau verifikator dalam pengumpulan data. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa berupa penampilan, tata krama atau sikap dari seorang surveyor atau verifikator. Selain itu juga ditanyakan ulang beberapa pertanyaan yang ada dalam form guna mengecek silang (*crosscheck*) jawaban yang diberikan oleh responden.
2. Check on the Spot: yaitu uji petik yang dilakukan dengan cara mendatangi secara diam-diam (pemeriksaan mendadak/sidak) surveyor yang sedang melakukan kegiatan pengumpulan data. Setelah surveyor selesai melakukan kegiatan pengumpulan data, maka formnya langsung diambil untuk melihat apakah surveyor sudah melakukan pengumpulan data dengan benar (form terisi semua) dan tidak bertindak curang (*cheating*) misalnya dengan mengisi form tanpa wawancara.
3. Check in the field: uji petik yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung responden yang sudah diwawancarai oleh surveyor atau verifikator. Personil QC menanyakan penampilan, tata krama atau sikap dari surveyor atau verifikator. Selain itu juga ditanyakan ulang beberapa pertanyaan yang ada dalam form guna mengecek silang (*crosscheck*) jawaban yang diberikan oleh responden.

Pelaksanaan Uji petik dilaksanakan oleh supervisor / coordinator lapangan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Disamping itu, tim ahli pusat juga melakukan supervise ke beberapa daerah. Kegiatan supervise tim ahli pusat dilakukan pada periode survey yaitu tanggal 14-24 Mei 2012.

Tabel 29. Daftar wilayah survey yang di supervisi

No	Wilayah	Nama Tim Ahli	Tanggal
1	Jawa Timur	Chris Majewski	14-16 May 2012
2	Sumatera Barat	Robert Suharno	14-16 May 2012
3	Bali	I Made Sumertajaya	16-18 May 2012

Jika terdapat indikasi seorang surveyor melakukan kecurangan atau tidak melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang ditetapkan, maka koordinator surveyor/verifikator bersama personil QC melakukan uji petik bersama-sama. Yang mempunyai hak bertanya kepada responden adalah koordinator surveyor/verifikator. Jawaban responden pada saat uji petik itulah yang menjadi acuan apakah surveyor/verifikator yang melakukan kesalahan atau responden yang salah memberikan jawaban.

Jika jawaban yang salah disebabkan kesalahan responden maka data bisa dipakai dengan catatan diperbaiki dahulu sesuai jawaban yang sebenarnya dan surveyor/verifikator diberi teguran lisan agar lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan proses pengumpulan data. Jika diketahui yang melakukan kesalahan adalah surveyor/verifikator dan terbukti melakukan kecurangan (*cheating*) atau mengisi form sendiri, maka data tidak bisa digunakan dan surveyor/verifikator diberhentikan dari segala kegiatan survey dan verifikasi.

3.2. Validasi Data

Validasi data hasil kegiatan pendataan sekolah dan orang tua siswa pada kabupaten/kota terpilih divalidasi pada tingkat kabupaten untuk memastikan data pada form pendataan sekolah dan orang tua siswa, terisi semua sesuai dengan petunjuk penulisan dan pengisian pada form tersebut. Setelah divalidasi dikirimkan ke Manajemen Pusat untuk dilakukan proses data entry.

Jika selama proses validasi terdapat masalah pada jawaban questioner, maka QC mengembalikan form survey kepada Koordinator surveyor agar dikembalikan kepada surveyor untuk diperbaiki.

Data yang sudah diperbaiki oleh surveyor dikumpulkan kembali oleh Koordinator surveyor dan divalidasi kembali sampai tidak terdapat masalah. Jika tidak bermasalah pada data tersebut, maka data diterima untuk dilanjutkan pada proses berikutnya.

Handling Dokumen

Handling dokumen merupakan suatu rangkaian pengiriman dokumen dari lapangan (tingkat surveyor) hingga pada manajemen pusat. Proses perpindahan dokumen disertai dengan proses QC dan validasi. Dokumen yang dinyatakan valid pada saat pemeriksaan akan dilanjutkan pada tingkatan selanjutnya. Maksud dilakukannya handling dokumen agar dokumen selalu terkontrol dan terseleksi menurut kualitas data.

Dokumen yang telah diverifikasi dan divalidasi dari tingkat surveyor akan diteruskan pada tingkat lead surveyor. Setelah dinyatakan layak, dokumen akan dilanjutkan pada validator wilayah/kabupaten. Setelah menjalani proses QC, oleh validator wilayah akan dikelompokkan dalam kategori yang sejenis. Pengiriman dokumen kepada QC pusat disertai dengan bukti QC yang telah dilakukan oleh validator wilayah. Dokumen yang valid menurut QC wilayah akan dilakukan kembali QC oleh validator pusat dengan standar yang sama. Jika telah memenuhi persyaratan akan ditulis dalam kartu kendali (kartu control) dokumen bukti validasi data. Kartu kendali dipergunakan untuk control terhadap kualitas dokumen. Dokumen yang dinyatakan valid akan dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu dokumen pendataan sekolah, dokumen pendataan orangtua siswa dan dokumen peraturan/kebijakan daerah terkait bidang pendidikan.

Untuk membedakan jenis dokumen, maka dokumen yang valid dikelompokkan dalam *batching* dengan warna berbeda. Penandaan dilakukan dengan warna dan penamaan pada cover dari *batching* dokumen untuk setiap kelompok dokumen.

Data Entry

Pelaksanaan data entry dilakukan di masing-masing wilayah survey, yang dikoordinasikan oleh Supervisor. Data yang telah dientri selanjutnya akan dikirim ke pusat dengan melalui beberapa tahapan QC dan telah dinyatakan valid.

Tabel 30. Rincian tugas masing-masing pengentri data kuesioner

NO	URAIAN KEGIATAN
1	Koding data untuk beberapa pertanyaan terbuka
2	Mengentri data form sekolah (240 buah) dan form orangtua (2880 buah)